



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



# LAPORAN KINERJA

SETDITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja disusun sesuai amanat: i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; ii) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; iii) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; iv) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan v) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan serta menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai mengenai pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan.

Laporan Kinerja dapat berperan sebagai alat penilaian kinerja dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu laporan kinerja merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Ucapan terimakasih

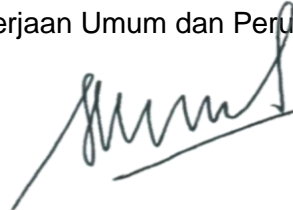


disampaikan kepada semua pihak karena keberhasilan yang diraih atas berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh pegawai.

Sebagai salah satu pertanggungjawaban kinerja, kami berharap Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi media untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2021

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan



Ir. Irma Yanti, MT

NIP. 196105101992032001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
1. Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan.....	3
2. Bagian Kepegawaian dan Umum .....	3
3. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik .....	4
D. Isu Strategis .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
A. Uraian Singkat Renstra .....	7
B. Perjanjian Kinerja .....	9
C. Metode Pengukuran .....	14
D. Target Tahun 2020 menurut Renstra .....	14
<b>BAB III KAPASITAS ORGANISASI .....</b>	<b>18</b>
A. Sumber Daya Manusia .....	18
B. Sarana dan Prasarana .....	30
C. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) .....	36
<b>BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 .....</b>	<b>37</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	37
B. Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun 2019-2020 .....	56
C. Realisasi Anggaran .....	57
D. Rekomendasi Evaluasi atas Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2019 .....	65
E. Perubahan di Tahun Anggaran 2020 .....	66

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Permasalahan .....	71
B. Tindak Lanjut.....	72



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	vi
Tabel 2	Capaian Kinerja Per-Komponen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	vii
Tabel 3	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Menurut Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020.....	16
Tabel 4	Rekapitulasi Golongan dan Pendidikan PNS Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	18
Tabel 5	Rekap Pendidikan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	19
Tabel 6	Rekapitulasi Usia Pegawai Berdasarkan Pendidikan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	20
Tabel 7	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Tahun 2020 .....	21
Tabel 8	Rekapitulasi Gender Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	21
Tabel 9	Rekapitulasi Gender Berdasarkan Jabatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	22
Tabel 10	Rekapitulasi Gender Berdasarkan Golongan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Tahun 2020 .....	22
Tabel 11	Rekap Jabatan Administrator dan Pengawas Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	23
Tabel 12	Subkoordinator Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	24
Tabel 13	Jabatan Fungsional Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	25
Tabel 14	Daftar Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pendukung Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	27
Tabel 15	Daftar Konsultan Individual Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	29
Tabel 16	Sandingan Kondisi SOTK Lama dan SOTK Baru Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	27
Tabel 17	Rekap Daftar Barang Ruangan Lantai 2 Wing 1 .....	32
Tabel 18	Rekap Daftar Barang Ruangan Lantai 2 Wing 2 .....	33
Tabel 19	Rekap Daftar Barang Ruangan Lantai 2 Wing 3 .....	35
Tabel 20	Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 Sesuai Cascading Renstra DJPI Tahun Anggaran 2020-2024.....	40
Tabel 21	Capaian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	46
Tabel 22	Capaian Kinerja Per-Komponen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	47

Tabel 23	Capaian Kinerja Per-Sub Komponen Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	53
Tabel 24	Realisasi Anggaran Per-Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan .....	58
Tabel 25	Realisasi Anggaran Per-Komponen Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020 .....	59
Tabel 26	Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020 .....	60
Tabel 27	Rekomendasi Evaluasi atas Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2019 .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 .....	5
Gambar 2	<i>Cascading</i> Program dan Kegiatan DJPI TA. 2020 – 2024.....	8
Gambar 3	Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 Awal Tahun 2020 .....	10
Gambar 4	Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 Revisi ke-1 .....	12
Gambar 5	Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 Revisi ke-1 .....	13
Gambar 6	Ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik serta Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.....	33
Gambar 7	Ruang Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan .....	34
Gambar 8	Ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik serta Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.....	36



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun atas target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020. Pada tahun 2020, secara keseluruhan terdapat 6 (enam) indikator kinerja kegiatan dan 21 (duapuluh satu) Output Kegiatan yang digunakan sebagai dasar penyusunan PK Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 sebagai pernyataan kesepakatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sepanjang tahun 2020. Pencapaian kinerja Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai berikut:

**Tabel 1**

Target Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Tahun 2020

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	Target (%)	Capaian (%)
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	55,92	55,92
SK. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	13,50	13,50
IKK Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	14,25
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10,00	10,00

**Tabel 2**  
**Capaian Kinerja Per-Komponen**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Tahun 2020

IKK	Komponen	Bobot	Target (Laporan)	Realisasi (Laporan)	Penilaian Kinerja Komponen
Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	100%	1	1	100%
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	100%	1	1	100%
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	100%	2	3	150%
	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	100%	1	1	100%
	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	100%	1	1	100%
	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	100%	1	1	100%
	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	100%	1	1	100%
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	100%	1	1	100%
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP	20%	1	1	100%
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIJJ	20%	1	1	100%
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi	20%	1	1	100%

IKK	Komponen	Bobot	Target (Laporan)	Realisasi (Laporan)	Penilaian Kinerja Komponen
	Perkantoran Direktorat PPI SDA				
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIP	20%	1	1	100%
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	20%	1	1	100%
Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	100%	2	2	100%
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	100%	1	1	100%
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	100%	3	3	100%
Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	100%	1	1	100%
	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	100%	2	2	100%
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	100%	3	3	100%
Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Monev DJPI	100%	1	2	100%
	Jumlah Laporan Keuangan	100%	1	1	100%
	Jumlah Laporan Kinerja	100%	1	1	100%
Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	100%	1	1	100%



IKK	Komponen	Bobot	Target (Laporan)	Realisasi (Laporan)	Penilaian Kinerja Komponen
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	90%	4	3	75%
Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	100%	2	2	100%
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	100%	3	3	100%

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 dilakukan dengan cara perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran dalam PK Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 dengan realisasinya.

Strategi yang dapat diterapkan ke depan untuk mengurangi hambatan pencapaian target 2020 yaitu:

1. Untuk memaksimalkan SDM yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan maka perlu dilakukan pemetaan dan pengembangan kompetensi terhadap seluruh ASN yang ada berdasarkan minat bakat dan keterampilan yang dimiliki, karena jumlah SDM ASN yang saat ini dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan belum sesuai dengan ABK, dimana SDM yang ada masih tergolong sedikit;
2. Kualitas dan produktifitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh unsur di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan;
3. Melakukan peningkatan kualitas SDM dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

4. Perlunya menyusun pemetaan kebutuhan SDM baik ASN dan Non ASN, untuk mengisi dan mendukung pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan agar bisa berjalan dengan optimal.
5. Diperlukan penyusunan produk-produk kajian untuk pimpinan Direktorat Jenderal yang sifatnya early warning/pemecahan masalah yang mendesak dan produk-produk yang sifatnya permintaan pimpinan Direktorat Jenderal;
6. Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pengelolaan, hingga ke tahap evaluasi anggaran yang tertib dan akuntabel;
7. Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan yang semakin partisipatif;
8. Dibutuhkan langkah-langkah konkret dalam menjalankan reformasi birokrasi yang dapat menghasilkan perbaikan kinerja organisasi;
10. Perlunya mitigasi resiko/ tindakan antisipasi bila terjadi sesuatu hal yang dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tertunda seperti terjadinya bencana alam, perubahan organisasi, dan terjadinya pandemi) yang berdampak juga kepada penilaian hasil capaian kinerja;

Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada awal tahun 2020, total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sejumlah Rp72.332.494.000,00 (tujuh puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), terdapat perubahan yaitu berkurang menjadi sejumlah Rp67.653.934.000,00 (enam puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Perubahan berasal dari adanya *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan anggaran penanganan bencana Covid-19 pada Revisi DIPA ke-2.

Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dilihat dari realisasi penyerapan anggaran sebagai hasil pengelolaan DIPA yang dialokasikan pada TA. 2020. Rencana penyerapan anggaran dan rencana fisik pada TA. 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan di awal tahun sebesar 100%, Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan *ie-Monitoring online* (sampai dengan tanggal 13 Januari 2021) yaitu sebesar 90,29% dengan realisasi capaian fisik sebesar 90,68%.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada tanggal 20 Desember 2018 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis DJPI, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan) melaksanakan tugas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya yang integratif, transparan dan akuntabel, serta melaksanakan peningkatan layanan administrasi yang prima dan penyediaan informasi yang akurat dan andal melalui peningkatan kualitas prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik.

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai, serta menyampaikan Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada DJPI atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dan penyampaian gambaran permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi masukan



dalam melakukan evaluasi untuk menjadi masukan perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bagian Ketiga yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Pasal 528 tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu:

*“Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal”*

Unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Pasal 529 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 528 Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal;
- e. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
- f. pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional.
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal;
- i. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
- j. pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
- k. pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat,

pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

### **C. Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memerlukan manajemen struktur organisasi yang kuat dan saling mendukung sehingga pendistribusian tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut:

1) **Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;**

Tugas : melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja program pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah direktorat jenderal

Susunan organisasi Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2) **Bagian Kepegawaian dan Umum;**

Tugas : melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, fasilitasi perencanaan kebutuhan, formasi, dan pengembangan pegawai, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi, pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana direktorat jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

Susunan organisasi Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

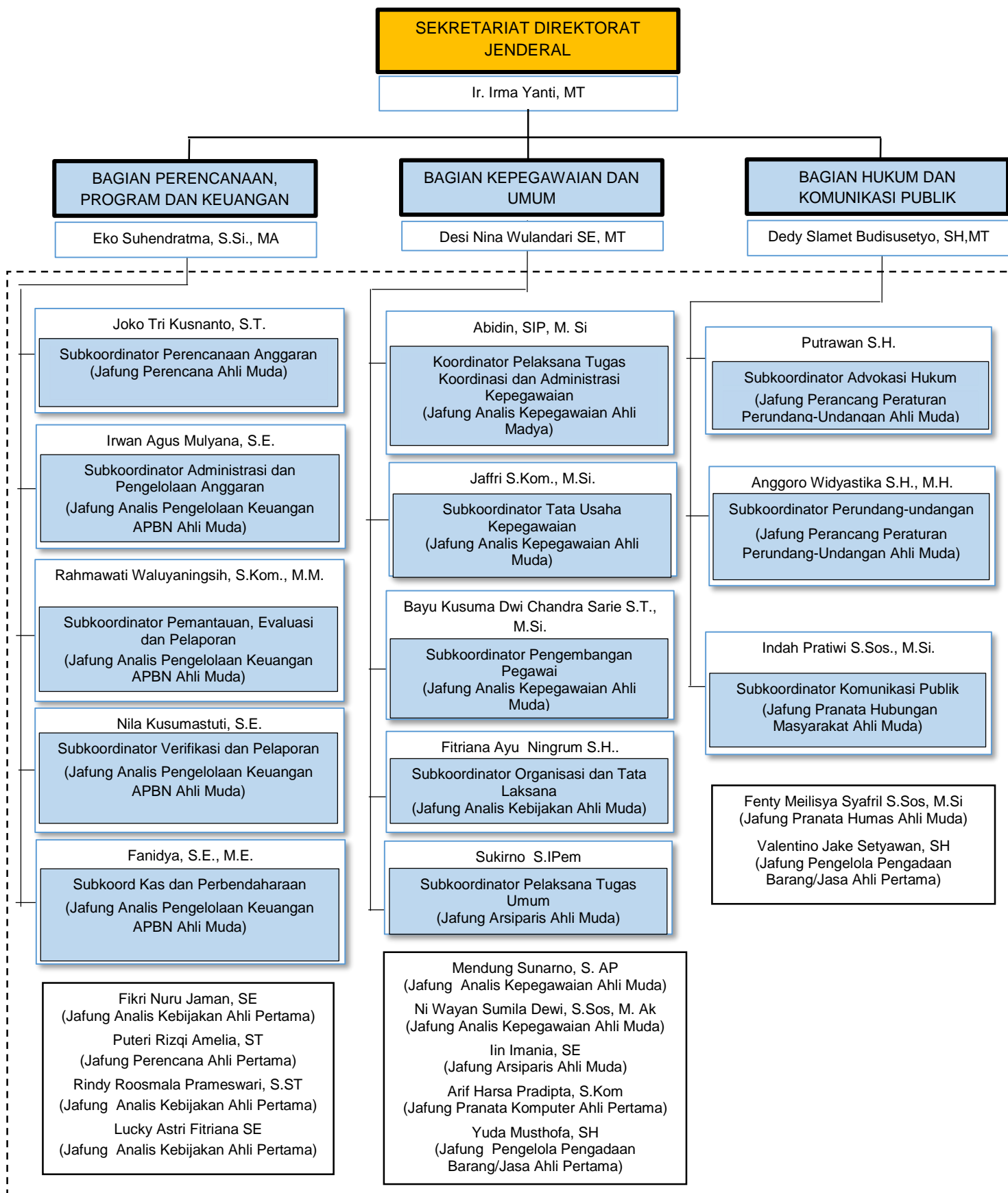
3) Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Tugas : melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang- undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pembiayaan, pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan Perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Susunan organisasi Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### Gambar 1

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020  
(Sesuai Permen-PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR)



#### D. Isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun 2020 dengan mengingat isu strategis yang ada, dimana isu tersebut menjadi tantangan yang harus dapat diatasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik, berhasil dan berdaya guna. Adapun isu strategis di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, sebagai berikut:

1. Terbentuknya DJPI menjadikan adanya perubahan tugas dan fungsi, dimana hal ini akan menyebabkan perubahan *core* dan proses bisnis dalam hal pembiayaan Perumahan bertambah dengan adanya pelaksana pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
2. Perubahan organisasi menyebabkan perlunya disusun perangkat organisasi dan tata laksana DJPI untuk mendukung tugas dan fungsi, sehingga menghasilkan kinerja *output* yang optimal.
3. Terbatasnya jumlah dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Koordinasi internal dan eksternal sesuai prinsip manajemen yang baik dan memenuhi *good governance*;
4. Tata kerja yang memenuhi prinsip manajemen yang baik termasuk prinsip administrasi tata kelola penggunaan keuangan. Tata kerja ini meliputi teknis dan pelayanan, sesuai standar operasional dan prosedur di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
5. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan berkurangnya pejabat eselon 3 dan ditiadakannya pejabat eselon 4 yang berubah menjadi Jabatan Fungsional, maka diperlukan pelatihan dan pembinaan yang memadai sehingga bisa lebih memahami tugas dan fungsinya dengan baik.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Uraian Singkat Renstra**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan) mendukung terealisasinya sasaran kinerja seperti dimuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 – 2024. Dengan berubahnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal di bidang pembiayaan perumahan, juga melaksanakan tugas dan fungsi terkait bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum.

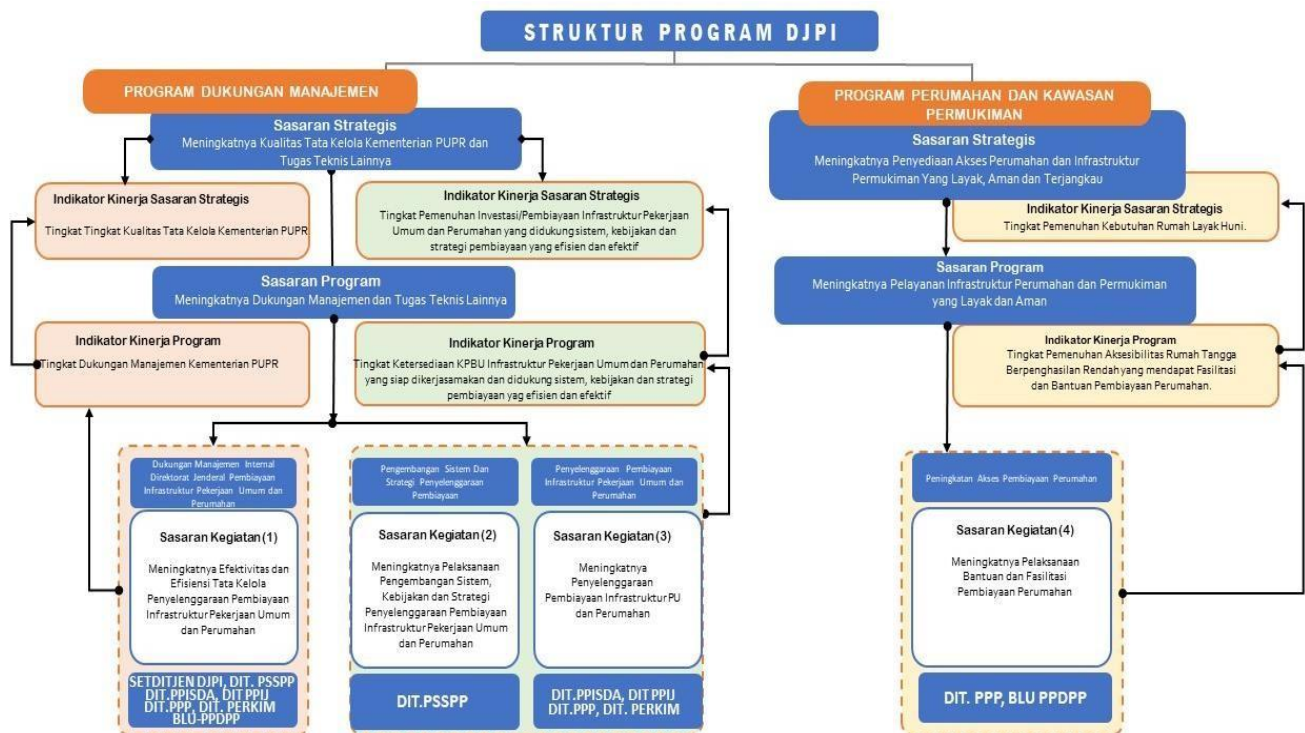
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai salah satu Unit Eselon II yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menjabarkan kebijakan dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tentunya akan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan Kementerian PUPR, sehingga Dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan Negara.

#### **1. Tujuan**

Tujuan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, sebagai berikut:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menetapkan tujuan Unit Kerja Tahun 2020-2024, sesuai dengan Sasaran Strategis Kementerian PUPR (SS5) yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya.

**Gambar 2**  
*Cascading Program dan Kegiatan DJPI TA. 2020 – 2024*



## 2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya” kemudian dijabarkan kedalam Sasaran Program “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya” dan Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan”.

## 3. Kebijakan

Berdasarkan agenda prioritas pembangunan dan arah kebijakan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri dan berkepribadian, maka berdasarkan hal tersebut kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kerumahtanggaan, ketatausahaan dan keprotokolan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembiayaan Perumahan melalui:
  - a. Penataan regulasi dan kebijakan;

- b. Pelayanan bantuan hukum;
- c. Peningkatan dukungan, tata laksana dan koordinasi kelembagaan;
- d. Peningkatan pengelolaan anggaran;
- e. Peningkatan kapasitas SDM serta pemberdayaan pemangku kepentingan; dan
- f. Pengembangan pengelolaan aset (property management).

#### **4. Strategi**

Mengimplementasikan reformasi birokrasi perencanaan dan penganggaran serta reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

#### **B. Perjanjian Kinerja**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan mengacu pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 2020 – 2024. Ringkasan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 sebagai berikut:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama tahun 2020 menyusun perjanjian kinerja (PK) sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pertama, PK awal pada bulan Januari 2020 antara Sesditjen PI dengan Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan. Disusun berdasarkan DIPA awal yaitu dengan pagu anggaran sejumlah Rp72.332.494.000,00 (tujuh puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Format Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan awal tahun 2020:





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Irma Yanti**  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**EKO D. HERIPOERWANTO**

Jakarta, Januari 2020  
Pihak Pertama

**IRMA YANTI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>			
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Eselon I	1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal 3) Layanan Perkantoran	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

Kegiatan  
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan

Anggaran  
Rp 72.332.494.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan

**EKO D. HERIPOERWANTO**

Jakarta, Januari 2020  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan

**IRMA YANTI**

**Gambar 3**

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020  
Awal Tahun 2020

2. Kedua, PK revisi pertama pada bulan April 2020 antara Sesditjen PI dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dirjen PI). Perjanjian kinerja ini disusun karena adanya *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 pada Revisi DIPA 2 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp67.653.934.000,00 (enam puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Format Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Revisi yang Pertama, Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berubah sebagaimana dijelaskan di atas:



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Irma Yanti**  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**EKO D. HERIPOERWANTO**

Jakarta, April 2020  
Pihak Pertama

**IRMA YANTI**

REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>			
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Eselon I	1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal 3) Layanan Perkantoran	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

**Kegiatan**

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan

**Anggaran**

Rp67.635.934.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, April 2020  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan

IRMA YANTI

**Gambar 4**

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020  
Revisi ke-1

- Ketiga, PK revisi kedua pada tanggal 26 Oktober 2020 antara Sesditjen PI dengan Dirjen PI. Penyusunan PK revisi kedua setelah terbitnya Renstra Kementerian sampai dengan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan anggaran mengacu pada DIPA Revisi ke-4 terkait adanya pergeseran antar output dengan pagu anggaran sama yaitu Rp67.653.934.000,00 (enam puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Format Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Revisi kedua telah berubah dari 3 (tiga) Indikator Kinerja menjadi 6 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irma Yanti  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Eko D. Heripoerwanto  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
  
EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, 26 Oktober 2020  
Pihak Pertama  
  
IRMA YANTI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
<b>SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>		
<b>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>	50,40%	55,92%
<b>SK. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>		
<b>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	13,5%	13,5%
<b>IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	15%	15%
<b>IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	10%	10%
<b>IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	10%	10%
<b>IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>	15%	15%
<b>IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik</b>	10%	10%

**KEGIATAN**  
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**ANGGARAN**  
Rp67.635.934.000,00

JAKARTA, 26 OKTOBER 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN  
  
EKO D. HERIPOERWANTO

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN  
  
IRMA YANTI

**Gambar 5**

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020  
Revisi ke-1

**Catatan:**

Dokumen Perjanjian Kinerja tertera dalam **Lampiran 1** pada *Buku Lampiran Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan*

**C. Metode Pengukuran**

Pengukuran yaitu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Berdasarkan Renstra 2020-2024 di Tahun Anggaran 2020, terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebagai berikut :

- 1) Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- 2) Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- 3) Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- 4) Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- 5) Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- 6) Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik

**D. Target Tahun 2020 Menurut Renstra**

**1. Target Kinerja**

Sesuai dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mendukung program-program yang ada di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan akan dilaksanakan Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Output Kegiatan (Rincian Output) sebagai berikut:

- 1) Reformasi Birokrasi Unit Eselon I;
- 2) Manajemen Transformasi Organisasi;
- 3) Pengelolaan Pegawai ;
- 4) Tata Kelola TNDE;
- 5) Kerumah-tangga;
- 6) Advokasi Hukum;
- 7) MOU dengan APH dan Instansi lain terkait;
- 8) Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I;
- 10) Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I;
- 11) Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI;
- 12) Strategi Komunikasi;
- 13) Publikasi;
- 14) Laporan Keuangan Unit Eselon I;
- 15) Laporan Keuangan Unit Eselon II;
- 16) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI;
- 17) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI;
- 18) Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan;
- 19) Gaji dan Tunjangan;
- 20) Operasionalisasi Kantor DJPI; dan
- 21) Operasionalisasi Kantor masing-masing Direktorat di Lingkungan DJPI.

## **2 Kerangka Pendanaan**

Total anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan awal tahun sebesar Rp72.332.494.000,00 (tujuh puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), terdapat perubahan anggaran yaitu berkurang menjadi sebesar Rp67.653.934.000,00 (enam puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Perubahan tersebut dikarenakan adanya *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 (Revisi DIPA ke 2);

Target capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 terdiri dari target sasaran kegiatan dan target indikator kinerja kegiatan.



**Tabel 3**

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Menurut Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Juta Rupiah)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN				
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN				
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	100	79.068
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :				
1	Tingkat efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100	79.068
KOORDINATOR : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan				74.068
OUTPUT KEGIATAN :				
1	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	Layanan	1	403
	1 Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	403
2	Manajemen Transformasi Organisasi	Layanan	2	1.372
	1 Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	Laporan	2	1.372
3	Pengelolaan Pegawai	Orang	260	1.671
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	Laporan	3	1.671
4	Tata Kelola TNDE dan Arsip	Layanan	1	498
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	Laporan	1	498
5	Kerumahtanggaan	Layanan	3	2.810
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	Laporan	3	2.810
6	Advokasi Hukum	Layanan	2	1.109
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	Laporan	2	1.109
7	MOU dengan APH dan Instansi Lain Terkait	Layanan	1	461
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	Laporan	1	461
8	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Layanan	3	1.724
	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	3	1.724
9	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	Layanan	1	774

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Juta Rupiah)
	1	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Laporan	1	774
10		Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	Layanan	4	2.395
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	Laporan	4	2.395
11		Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	Layanan	1	287
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	Laporan	1	287
12		Strategi Komunikasi	Layanan	2	1.516
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	Laporan	2	1.516
13		Publikasi	Layanan	3	1.406
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	Laporan	3	1.406
14		Laporan Keuangan Unit Eselon I	Laporan	1	1.651
	1	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	1	1.651
		Laporan Kinerja Unit Eselon II	Laporan	1	158
	1	Jumlah Laporan Kinerja	Laporan	1	158
		Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PIPUP TA.2020			
16		Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	Laporan	2	1.074
	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	2	1.074
17		Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	Unit	1	2.366
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	2.366
18		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	Unit	1	1.728
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	Unit	1	1.728
19		Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	1	410
	1	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	1	410
20		Gaji dan Tunjangan DJPI	Layanan	1	29.714
	1	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	29.714
21		Operasionalisasi Kantor DJPI	Layanan	1	15.540
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	15.540



## BAB III

### KAPASITAS ORGANISASI

#### A. Sumber Daya Manusia

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melaksanakan Restrukturisasi Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk mencapai kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sesuai target yang telah ditetapkan.

Rekapitulasi Data Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

- 1) Rekapitulasi PNS Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 menurut Golongan dan Pendidikan

**Tabel 4**

Rekapitulasi Golongan dan Pendidikan PNS  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Tahun 2020

No	Golongan	Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Belum Terdata	
1	IV/e	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	IV/d	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	IV/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	IV/b	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
5	IV/a	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6	III/d	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	10
7	III/c	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	11
8	III/b	0	2	3	0	0	0	4	0	0	0	9
9	III/a	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
10	II/d	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
11	II/c	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
12	II/b	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
13	II/a	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
14	I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		2	16	25	1	0	1	9	0	0	0	54

**Tabel 5**

Rekap Pendidikan Pegawai  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Tahun 2020

No.	Pendidikan	Status Pegawai	Jumlah	Total PNS	Total Non PNS	Total
1	S3	PNS	2	54	81	135
		Non PNS	0			
2	S2	PNS	16			
		Non PNS	4			
3	S1	PNS	25			
		Non PNS	32			
4	D3	PNS	1			
		Non PNS	4			
5	D2	PNS	0			
		Non PNS	0			
6	D1	PNS	1			
		Non PNS	0			
7	SLTA	PNS	9			
		Non PNS	31			
8	SLTP	PNS	0			
		Non PNS	9			
9	SD	PNS	0			
		Non PNS	1			
10	BELUM	PNS	0			
		NON PNS	0			

**Tabel 6**

Rekapitulasi Usia Pegawai Berdasarkan Pendidikan  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Tahun 2020

NO	USIA	TINGKAT PENDIDIKAN																		TOTAL
		S3		S2		S1		D3		D2		D1		SLTA		SLTP		SD	Belum Terdata	
		Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	Teknik	Non Teknik	
1	Di Bawah 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	20-25	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
3	26-30	0	0	0	1	1	16	0	1	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	24
4	31-35	0	0	0	3	0	10	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	23
5	36-40	0	0	1	6	2	10	0	3	0	0	0	0	0	11	0	2	0	0	35
6	41-45	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	11
7	46-50	0	0	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	14
8	51-55	0	0	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	17
9	56-60	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6
10	Di Atas 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
JUMLAH		1	1	6	14	4	53	0	5	0	0	0	1	2	38	0	9	1	0	135

**Tabel 7**

Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan

Sekretariat Direktorat Jenderal  
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020

NO	Golongan	Jumlah
1	IV/e	1
2	IV/d	1
3	IV/c	0
4	IV/b	4
5	IV/a	4
6	III/d	10
7	III/c	11
8	III/b	9
9	III/a	7
10	II/d	1
11	II/c	2
12	II/b	1
13	II/a	3
14	I/d	0
15	I/c	0
16	I/b	0
17	I/a	0
18	TOTAL	54

**Tabel 8**

Rekapitulasi Gender Pegawai

Sekretariat Direktorat Jenderal  
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020

NO	Gender	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	Laki-laki	99	73,33
2	Perempuan	36	26,67
3	Total	135	100

**Tabel 9**

Rekapitulasi Gender Berdasarkan Jabatan  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Tahun 2020

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI			PRESENTASE PEGAWAI		
		Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
1	Pejabat Struktural	3	2	5	60,00	40,00	100
2	Pejabat Fungsional Tertentu	18	11	29	62,07	37,93	100
3	Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana	17	3	20	85,00	15,00	100
Total		38	16	54	70,37	29,63	100

**Tabel 10**

Rekapitulasi Gender Berdasarkan Golongan  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan  
Tahun 2020

No	Golongan	Gender				Total	
		Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	IV/e	1	100,00	0	0,00	1	100
2	IV/d	0	0,00	1	100,00	1	100
3	IV/c	0	0,00	0	0,00	0	0
4	IV/b	4	100,00	0	0,00	4	100
5	IV/a	2	50,00	2	50,00	4	100
6	III/d	6	60,00	4	40,00	10	100
7	III/c	6	54,55	5	45,45	11	100
8	III/b	8	88,89	1	11,11	9	100
9	III/a	4	57,14	3	42,86	7	100
10	II/d	1	100,00	0	0,00	1	100
11	II/c	2	100,00	0	0,00	2	100
12	II/b	1	100,00	0	0,00	1	100
13	II/a	2	66,67	1	33,33	3	100
14	I/d	0	0,00	0	0,00	0	0
15	I/c	0	0,00	0	0,00	0	0
16	I/b	0	0,00	0	0,00	0	0
17	I/a	0	0,00	0	0,00	0	0
JUMLAH		37	68,52	17	31,48	54	100

**Tabel 11**

Rekap Jabatan Administrator dan Pengawas  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Tahun 2020

NO	Eselon	Jumlah
1	I.a	1
2	I.b	0
3	II.a	1
4	II.b	0
5	III.a	3
6	III.b	0
7	IV	0
Jumlah		5

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibantu oleh Koordinator dan beberapa Subkoordinator serta Jabatan Fungsional. Data Koordinator, Subkoordinator dan Jabatan Fungsional seperti terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 12**  
**Subkoordinator**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Tahun 2020

No	NAMA	Subkoordinator
<b>Bagian Kepegawaian dan Umum</b>		
1	Abidin, SIP, M. Si	Koordinator Kepegawaian Pelaksana Tugas Koordinasi dan Administrasi
2	Jaffri S.Kom., M.Si.	Subkoordinator Tata Usaha Kepegawaian
3	Bayu Kusuma Dwi Chandra Sarie S.T., M.Si.	Subkoordinator Pengembangan Pegawai
4	Fitriana Ayu Ningrum S.H.	Subkoordinator Organisasi dan Tata Laksana
5	Sukirno S.IPem	Subkoordinator Pelaksana Tugas Umum
<b>Bagian Hukum dan Komunikasi Publik</b>		
5	Putrawan S.H.	Subkoordinator Advokasi Hukum
6	Anggoro Widyastika S.H., M.H.	Subkoordinator Perundang-undangan
7	Indah Pratiwi S.Sos., M.Si.	Subkoordinator Komunikasi Publik
<b>Bagian Perencanaan Program dan Keuangan</b>		
8	Joko Tri Kusnanto, S.T.	Subkoordinator Perencanaan Anggaran
9	Irwan Agus Mulyana, S.E.	Subkoordinator Administrasi dan Pengelolaan Anggaran
10	Rahmawati Waluyaningsih, S.Kom., M.M.	Subkoordinator Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
11	Fanidya, S.E., M.E.	Subkoord Kas dan Perbendaharaan
12	Nila Kusumastuti, S.E.	Subkoordinator Verifikasi dan Pelaporan

**Tabel 13**

Jabatan Fungsional  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Tahun 2020

NO.	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
<b>BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN</b>		
1	Joko Tri Kusnanto, ST	Perencana Ahli Muda
2	Irwan Agus Mulyana, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
3	Rahmawati Waluyaningsih, S.Kom, MM	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
4	Nila Kusumastuti, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
5	Fanidya, SE, ME	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
6	Lucky Astri Fitriana SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
7	Rindy Roosmala Prameswari, S.ST	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
8	Fikri Nuru Jaman, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
9	Puteri Rizqi Amelia, ST	Perencana Ahli Pertama
<b>BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM</b>		
10	Abidin, SIP, M. Si	Analisis Kepegawaian Ahli Madya
11	Jaffri, S.Kom, M.Si	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
12	Bayu Kusuma Dwi C.S., ST, M.Si	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
13	Sukirno, S.Ipem	Arsiparis Ahli Muda
14	Fitriana Ayu Ningrum, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda
15	Ni Wayan Sumila Dewi, S.Sos, M. Ak	Analisis Kepegawaian Ahli Muda



NO.	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
16	Mendung Sunarno, S. AP	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
17	Iin Imania, SE	Arsiparis Ahli Muda
18	Arif Harsa Pradipta, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
19	Yuda Musthofa, SH	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
<b>BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		
20	Putrawan, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
21	Anggoro Widyastika, SH, MH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
22	Indah Pratiwi, S.Sos, M.Si	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
23	Fenty Meilisya Syafril S.Sos, M.Si	Pranata Humas Ahli Muda
24	Valentino Jake Setyawan, SH	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

**Tabel 14**

Daftar Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pendukung  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Erwin, SP	Penyusun Program dan Rencana Anggaran
2	Haerul Anwar, SAP	Penyusun Monev dan Pelaporan
3	Endang Rusmaya	Pengolah Monev dan Pelaporan
4	Haqqi Harisina, S.Kom	Penelaah BMN
5	Patria Trian Setiadi, S.Pd	Penelaah Keuangan
6	Nurmawati	Pengadministrasi Umum
7	Muhammad Jaya AW, SE	Penelaah Barang dan Jasa
8	Denny Darmawan	Penelaah BMN
9	Ruri Rumita Maizar, S.Psi	Penelaah Tata Naskah Dinas
10	Indriati, A.Md	Penata Keuangan
11	Rahmatullah, A.Md	Penata Keuangan
12	Rizka Marissa Utami. P, SH	Penelaah Tata Naskah Dinas
13	Khoirul Anwar, S.Sos.I	Penelaah Keuangan
14	Sofian Yusuf Widodo, S.Psi	Penelaah Kepegawaian
15	Budianto, SE	Penata Keuangan
16	Haryunta Rizky Pratama, SE	Pengadministrasi Umum
17	Muhamad Muklis, SE	Pengadministrasi Umum
18	Dwiastuti Wahyuningsih, S.Pd	Penelaah Tata Naskah Dinas
19	Isam Purbaya, A.Md	Pengadministrasi Umum
20	Tatang	Petugas Teknik

NO	NAMA	JABATAN
21	Suroto	Petugas Teknik
22	Karyoto	Pengadministrasi Umum
23	Hari Roberto	Pengatur Sarana Kantor
24	Sobirin	Pengatur Sarana Kantor
25	Riki Salman Mubaroq	Pengatur Sarana Kantor
26	Jumadi	Pengatur Sarana Kantor
27	Halimahtus Sadiyah	Penelaah Tata Naskah Dinas
28	Putri Asiah	Pengadministrasi Umum
29	Dwi Priyono	Pengadministrasi Umum
30	Marlinah	Pengadministrasi Umum
31	Gilang Bayu Perdana, S.Kom	Penelaah Barang dan Jasa
32	Sartini, SE	Penelaah Keuangan
33	Suryanah, S.Pd.	Sekretaris
34	Shara Vadya, S.I.Kom	Penelaah Pelayanan Informasi Publik
35	Dony Triastomo, SE	Penelaah Advokasi Hukum
36	Insan Hermawanto, SAP	Penata Bahan Pustaka
37	Andi	Pengadministrasi Umum
38	Dwi Cristianto	Pengadministrasi Umum
39	Komarudin	Pengadministrasi Umum
40	Michael Adha	Pengadministrasi Umum

**Tabel 15**

Daftar Konsultan Individual  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Tahun 2020

NO	NAMA	Bidang Pekerjaan
1	Joko Pitono, ST	Konsultan Individual Bidang Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
2	Diane Khatrin Tri Asih, SE	Konsultan Individual Bidang Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Kurtubi, ST	Konsultan Individual Bidang Penyusunan Dan Koordinasi Rencana Kerja Anggaran
4	Mohamad Iqbal, S.Kom	Konsultan Individual Bidang Penyusunan Dan Koordinasi Rencana Kerja Anggaran
5	Didik Pramono, S.Pd	Konsultan Individual Bidang Pemantauan Pelaksanaan Anggaran
6	Singgih Zatomi, SH	Konsultan Individual Bidang Pemantauan Pelaksanaan Anggaran
7	Sunardi	Konsultan Terampil Kelistrikan
8	Sri Andriyani, Sh, M.Si	Konsultan Bidang Administrasi dan Pemutakhiran Data
9	Gema Milda Hidayati, Spd	Konsultan Bidang Pembinaan Pegawai
10	Zahrah Fadhillah Nindita, ST	Konsultan Bidang Pembiayaan Perumahan
11	Khoirul Mu'minin, S.Tr.T	Konsultan Bidang Administrasi dan Pemutakhiran Data
12	Disa Tafira Raimalda, SH	Konsultan Bidang Hukum
13	Iva Parikhah, S.Kom	Konsultan Bidang Hukum
14	Ratna Dewi Anggraeni, SH, MT	Konsultan Bidang Planologi
15	Fahmi Nurhuda, S.Ds	Konsultan Bidang Desain
16	Emma R. Aliudin, S.Sos	Konsultan Bidang Komunikasi
17	Ryan Aditya Pradana, S.Ikom	Konsultan Bidang Komunikasi
18	Stephanes M. Anugrah R, S.Kom	Konsultan Bidang Fotografi
19	Sopan Sopian, S.S	Konsultan Bidang Fotografi
20	Arfan Haras, Spi, MM	Bidang Manajemen Asset

Terbitnya Permen-PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR yang menggantikan regulasi sebelumnya yaitu Permen-PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR telah merubah Struktur Organisasi di semua Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan termasuk di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Beberapa perubahan kondisi di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan seperti pada tabel berikut:

**Tabel 16**

**Sandingan Kondisi SOTK Lama dan SOTK Baru**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Tahun 2020

No.	SOTK LAMA	SOTK BARU
1	Sesuai Permen-PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR	Sesuai Permen-PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR
2	4 orang Pejabat Eselon 3: - Kepala Bagian Anggaran dan Evaluasi - Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala - Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik - Kepala Bagian Keuangan dan Umum	3 orang Pejabat Eselon 3: - Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan - Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum - Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
3	12 Pejabat Eselon 4 : - Bagian Anggaran dan Evaluasi : 3 orang Kasubbag - Bagian Kepegawaian dan Ortala : 3 orang Kasubbag - Bagian Hukum dan Komunikasi Publik : 3 orang Kasubbag - Bagian Keuangan dan Umum :3 orang Kasubbag	- Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan : 5 orang Subkoordinator - Bagian Kepegawaian dan Umum : 3 Koordinator dan 4 orang Subkoordinator - Bagian Hukum dan Komunikasi Publik : 3 orang Subkoordinator.  24 orang Jabatan Fungsional Tertentu (1 Orang Jafung merangkap sebagai Koordinator dan 12 orang merangkap sebagai Sub Koordinator)

**B. Sarana dan Prasarana**

Kemajuan teknologi membuka konsekuensi tentang tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, akan sulit akan dapat mencapai tujuan dengan baik.

Agar semua kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi, baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien, maka pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus tersedia dan dapat digunakan dengan baik.

Sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut:

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu;
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa;
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin;
4. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku;
5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin;
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan;
7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya;

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan digolongkan berdasarkan manfaatnya sebagai berikut:

1. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya;
2. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi mempercepat proses, membangkit dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan;
3. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan dan mesin absensi.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja, baik berupa barang fisik maupun non fisik (*software*). Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan bisa dipergunakan sesuai fungsinya.

Rekap Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2020 yaitu tertera pada tabel berikut:

**Tabel 17**

Rekap Daftar Barang Ruangan  
Lantai 2 Wing 1  
(Ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,  
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dan Bagian Perencanaan Program dan Keuangan)

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Lemari Besi/Metal	10	Buah
2	Lemari Kayu	1	Buah
3	Filing Cabinet Besi	1	Buah
4	CCTV - Camera Control Television System	1	Buah
5	Alat Penghancur Kertas	5	Buah
6	White Board Electronic	1	Buah
7	LCD Projector/Infocus	1	Buah
8	Acces Control System	1	Buah
9	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah
10	Meja Kerja Kayu	42	Buah
11	Meja Rapat	2	Buah
12	Kursi Fiber Glas/Plastik	50	Buah
13	Cubikal	40	Buah
14	A.C. Sentral	6	Buah
15	A.C. Split	6	Buah
16	Exhause Fan	1	Buah
17	Kitchen Set	1	Buah
18	Televisi	3	Buah
19	Camera Video	1	Buah
20	Handy Cam	1	Buah
21	Tripod Camera	1	Buah
22	Camera Digital	4	Buah
23	Handy Talky (HT)	4	Buah
24	P.C Unit	40	Buah
25	Note Book	4	Buah
26	Tablet PC	3	Buah
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	Buah



**Gambar 6**

Ruang Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik serta Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

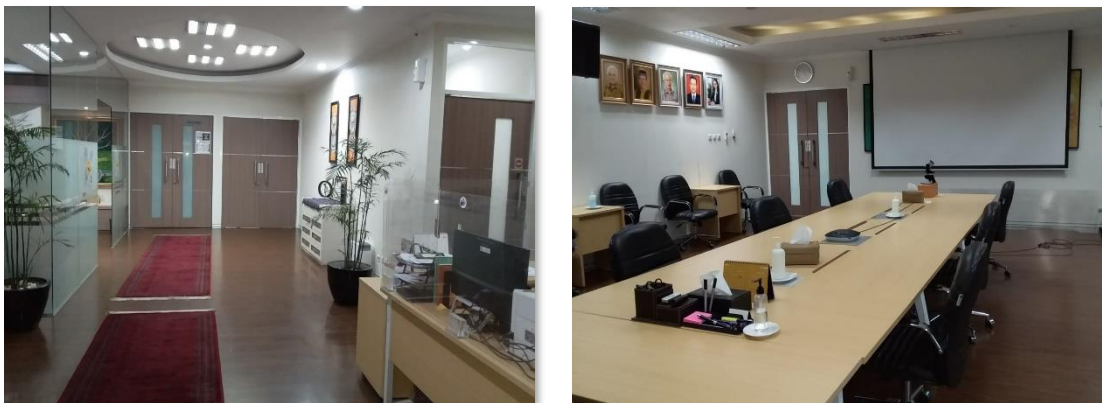
**Tabel 18**

Rekap Daftar Barang Ruangan  
Lantai 2 Wing 2  
(Ruang Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan)

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Lemari Besi/Metal	4	Buah
2	Lemari Kayu	8	Buah
3	Rak Kayu	1	Buah
4	CCTV - Camera Control Television System	1	Buah
5	Alat Penghancur Kertas	2	Buah
6	White Board Electronic	1	Buah
7	LCD Projector/Infocus	1	Buah
8	Acces Control System	1	Buah
9	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah
10	Meja Kerja Kayu	4	Buah
11	Meja Rapat	3	Buah
12	Meja Resepsionis	5	Buah
13	Meja Makan Kayu	6	Buah



No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
14	Kursi Fiber Glas/Plastik	48	Buah
15	Cubikal	5	Buah
16	Meubelair Lainnya	1	
17	Lemari Es	1	Buah
18	A.C. Sentral	6	Buah
19	A.C. Split	4	Buah
20	Exhause Fan	1	Buah
21	Kitchen Set	1	Buah
22	Televisi	10	Buah
23	Dispenser	1	Buah
24	Lensa Kamera	2	Buah
25	Lampu Blitz Kamera	1	Buah
26	Mesin Barcode	4	Buah
27	Handy Talky (HT)	1	Buah
28	Electrik Thermometer	1	Buah
29	Mini Komputer	1	Buah
30	P.C Unit	7	Buah
31	Note Book	1	Buah
32	Tablet PC	2	Buah



**Gambar 7**

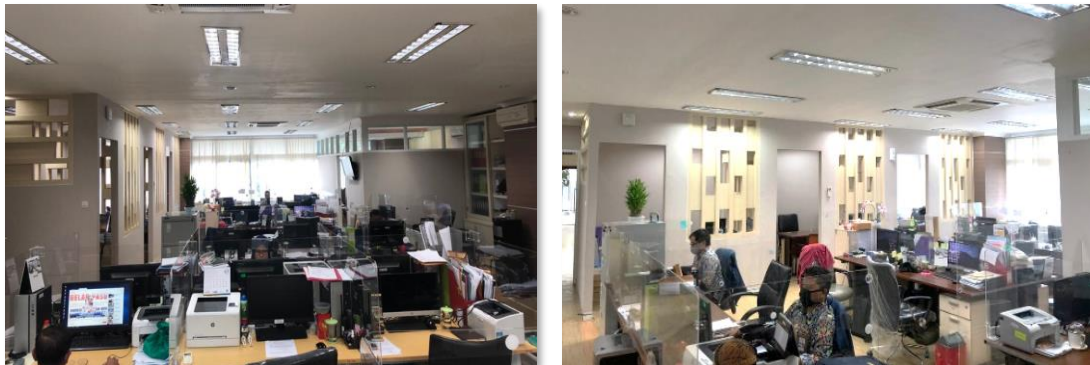
Ruang Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**Tabel 19**

Rekap Daftar Barang Ruangan  
Lantai 2 Wing 3  
(Ruang Bagian Kepegawaian dan Umum)

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Lemari Besi/Metal	6	Buah
2	Lemari Kayu	4	Buah
3	Rak Besi	20	Buah
4	Filing Cabinet Besi	4	Buah
5	Laci Box	2	Buah
6	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	2	Buah
7	CCTV - Camera Control Television System	2	Buah
8	Alat Penghancur Kertas	2	Buah
9	White Board Electronic	1	Buah
10	Laser Pointer	6	Buah
11	LCD Projector/Infocus	5	Buah
12	Softboard	1	Buah
13	Acces Control System	1	Buah
14	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	Buah
15	Meja Kerja Kayu	29	Buah
16	Meja Rapat	3	Buah
17	Meja Komputer	1	Buah
18	Meja Makan Kayu	6	Buah
19	Kursi Fiber Glas/Plastik	83	Buah
20	Cubikal	24	Buah
21	Air Cleaner	17	Buah
22	Lemari Es	1	Buah
23	A.C. Sentral	9	Buah
24	A.C. Split	3	Buah
25	Kipas Angin	2	Buah
26	Exhause Fan	1	Buah
27	Kitchen Set	1	Buah
28	Televisi	7	Buah
29	Sound System	1	Buah
30	Wireless	1	Buah

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
31	Mic Conference	1	Buah
32	Camera Video	1	Buah
33	Voice Recorder	10	Buah



**Gambar 8**

Ruang Bagian kepegawaian dan Umum

**Catatan:**

Rincian sarana dan prasarana tertera dalam **Lampiran 4** pada *Buku Lampiran Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan*.

**C. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)**

Anggaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara murni Bagian Anggaran (BA) 033. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam Renstra DJPI 2020- 2024, yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan.

Pada awal tahun anggaran 2020 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal sejumlah Rp72.332.494.000,00 (tujuh puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Terdapat perubahan karena adanya *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 pada Revisi DIPA 2 menjadi sebesar Rp67.653.934.000,00 (enam puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Rincian Kronologi Revisi DIPA tahun Anggaran 2020 yang menyebabkan perubahan Anggaran di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Revisi DIPA 1 : pada tanggal 20 Februari 2020 karena adanya pergantian KPPN untuk pelaksanaan PHLN dengan Anggaran sama sebesar Rp72.332.494.000,00;
- 2) Revisi DIPA 2 : pada tanggal 27 April 2020 karena adanya *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan kebutuhan anggaran dalam penanganan Covid-19 dengan Anggaran sebesar Rp67.653.934.000,00;

Catatan:

Rincian DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020 tertera dalam **Lampiran 3** pada *Buku Lampiran Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan*

## **BAB IV**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020**

#### **A. Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020**

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan yang akuntabel, sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melakukan akuntabilitas kinerja tersebut, maka perlu disampaikan berbagai capaian kinerja. Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pencapaian kinerja tahun 2020 ini, merupakan umpan balik guna melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menetapkan 21 (dua puluh satu) komponen (output kegiatan), yaitu :

- 1) Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi
- 2) Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi
- 3) Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai
- 4) Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip
- 5) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan
- 6) Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum
- 7) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama
- 8) Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
- 9) Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- 10) Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan

- 11) Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN
- 12) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat
- 13) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi
- 14) Jumlah Laporan Keuangan
- 15) Jumlah Laporan Kinerja
- 16) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
- 17) Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran
- 18) Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi
- 19) Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan
- 20) Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan
- 21) Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor

**Tabel 20**

**CAPAIAN KINERJA**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020  
Sesuai Cascading Renstra DJPI Tahun Anggaran 2020-2024

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip yang disusun dibandingkan dengan target (10%)	10%	Tata Kelola TNDE dan Arsip	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	100%	1	1	100%	15%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan yang disusun dibandingkan dengan target (10%)	10%	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI	50%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	100%	1	1	100%	
				Kerumahtanggaan	50%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	100%	2	3	150%	
		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)	15%	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI	100%	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	100%	1	1	100%	

SETDITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)	15%	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI	100%	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi		1	1	100%	
		Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Re novasi Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)	15%	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	100%	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Re novasi Gedung dan Bangunan	100%	1	1	100%	
		Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)	15%	Gaji dan Tunjangan DJPI	100%	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	100%	1	1	100%	
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (10%)	10%	Operasionalisasi Kantor DJPI	100%	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	100%	1	1	100%	



SETDITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (10%)	10%	Operasionalisasi Kantor Direktorat	100%	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP	20%	1	1	100%	
						Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIJJ	20%	1	1	100%	
						Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPI SDA	20%	1	1	100%	
						Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIP	20%	1	1	100%	
						Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	20%	1	1	100%	
Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum yang disusun dibandingkan dengan target (30%)	30%	Advokasi Hukum	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	100%	2	2	100%	15%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama yang	20%	MOU dengan APH dan Instansi Lain Terkait	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	100%	1	1	100%	

SETDITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
		disusun dibandingkan dengan target (20%)									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	50%	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	100%	3	3	100%	
Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%)	25%	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	100%	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	100%	1	1	100%	10%
		Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%)	25%	Manajemen Transformasi Organisasi	100%	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	100%	2	2	100%	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%)	50%	Pengelolaan Pegawai	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	100%	3	3	100%	

SETDITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dibandingkan dengan target (50%)	50%	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI	50%	Jumlah Laporan Monev DJPI	100%	1	2	100%	10%
				Laporan Keuangan Eselon I	50%	Jumlah Laporan Keuangan	100%	1	1	100%	
		Jumlah Laporan Kinerja yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	50%	Laporan Kinerja Unit Eselon II	100,0%	Jumlah Laporan Kinerja	100%	1	1	100%	
Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	50%	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	100%	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	100%	1	1	100%	14,25%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	50%	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	100%	4	3	75%	

SETDITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

IKK	Bobot	Pengukuran	Bobot	Rincian Output	Bobot	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen	Penilaian Kinerja IKK
Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	50%	Strategi Komunikasi	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	100%	2	2	100%	10%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi yang disusun dibandingkan dengan target (50%)	50%	Publikasi	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	100%	3	3	100%	

Keterangan:

- 1) Penilaian Kinerja pada Komponen Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan pada Tabel Capaian Kinerja di atas mencapai 150% dikarenakan adanya tambahan paket kegiatan (sub komponen) di tengah tahun yaitu Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sehingga capaian kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan di awal tahun yaitu dari 2 (dua) laporan menjadi 3 (tiga) laporan;
- 2) Penilaian Kinerja pada Komponen Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan pada Tabel Capaian Kinerja di atas hanya mencapai 75% dikarenakan adanya koreksi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun yaitu dari 4 (empat) laporan menjadi 3 (tiga) laporan

Pencapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dilihat pada tabel Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 21**

**Capaian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Tahun 2020

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	55,92	55,92
SK. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	13,50
IKK Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00
IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00
IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00
IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	14,25
IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10,00	10,00

**Tabel 22**

**Capaian Kinerja Per-Komponen**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	IKK	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	100%	1	1	100%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	100%	1	1	100%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	100%	2	3	150%
		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	100%	1	1	100%
		Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	100%	1	1	100%
		Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	100%	1	1	100%

SETDITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

Sasaran Kegiatan	IKK	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen
		Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	100%	1	1	100%
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	100%	1	1	100%
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP	20%	1	1	100%
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIJJ	20%	1	1	100%
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPI SDA	20%	1	1	100%
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIP	20%	1	1	100%
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	20%	1	1	100%
	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	100%	2	2	100%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	100%	1	1	100%

SETDITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

Sasaran Kegiatan	IKK	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen
	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	100%	3	3	100%
		Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	100%	1	1	100%
		Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	100%	2	2	100%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	100%	3	3	100%
	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Monev DJPI	100%	1	2	100%
		Jumlah Laporan Keuangan	100%	1	1	100%
		Jumlah Laporan Kinerja	100%	1	1	100%
	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	100%	1	1	100%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	90%	4	3	75%



SETDITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

Sasaran Kegiatan	IKK	Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Komponen
	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	100%	2	2	100%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	100%	3	3	100%



**Tabel 23**

**Capaian Kinerja Per-Sub Komponen**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	IKK	Sub Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Sub Komponen
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pengelolaan Arsip dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%	1	1	100%
		Penatausahaan dan Pengelolaan Bmn Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%	1	1	100%
		Fasilitasi Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	50%	1	1	25%
		Dukungan Operasional Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bangunan Gedung dan Pengamanan	50%	1	1	25%
		Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			1	50%
		Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	100%	1	1	100%

SETDITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

Sasaran Kegiatan	IKK	Sub Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Sub Komponen
		Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	100%	1	1	100%
		Pembangunanrenovasi gedung dan bangunan	100%	1	1	100%
		Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	1	1	100%
		Operionalisasi Kantor DJPI	100%	1	1	100%
	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pendampingan Hukum Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020	50%	1	1	50%
		Pembinaan Advokasi Hukum Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020	50%	1	1	50%
		Pembinaan Kerjasama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020	100%	1	1	100%
		Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bidang Pembiayaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020	20%	1	1	20%
		Pembinaan dan Pendampingan Peraturan Perundangundangan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020	40%	1	1	40%
		Fasilitasi Penyusunan NSPK Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020	40%	1	1	40%

SETDITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

Sasaran Kegiatan	IKK	Sub Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Sub Komponen
	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100%	1	1	100%
		Penguatan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	60%	1	1	60%
		Penyusunan Ketatalaksanaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	40%	1	1	40%
		Pelaksanaan Pembinaan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	50%	1	1	50%
		Penyelenggaraan Administrasi dan Pemutahiran Data Kepegawaian Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	30%	1	1	30%
		Fasilitasi Bimbingan Teknis Pengembangan SDM di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	20%	1	1	20%
	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal PIPUP TA.2020 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal PIPUP TA.2020	100%	1	2	100%

SETDITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

Sasaran Kegiatan	IKK	Sub Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Sub Komponen
		Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020	100%	1	1	100%
		Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PIPUP TA.2020	100%	1	1	100%
	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Penyusunan dan Koordinasi Rencana Kerja Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA.2021	100%	1	1	100%
		Penyusunan Pengelolaan Administrasi Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA.2020	30%	1	1	30%
		Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	30%	1	1	30%
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Satuan Kerja Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	30%	1	1	30%
		Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat	10%	1	1	10%

SETDITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

Sasaran Kegiatan	IKK	Sub Komponen	Bobot	Target	Realisasi	Penilaian Kinerja Sub Komponen
	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020	50%	1	1	50%
		Layanan Kehumasan Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020	50%	1	1	50%
		Pengelolaan Media Kreatif Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020	40%	1	1	40%
		Dokumentasi Kegiatan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020	40%	1	1	40%
		Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik Tahun 2020	20%	1	1	20%

## B. Perbandingan Kinerja Organisasi

### 1. Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun 2019-2020

Dalam rangka pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mendapatkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

a. Alokasi DIPA Tahun Anggaran 2019 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahap awal yaitu sejumlah Rp.67.600.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah), terdapat perubahan yaitu bertambah menjadi sejumlah Rp.77.581.453.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Perubahan Pagu Anggaran bersumber dari sisa lelang di Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk pemenuhan kebutuhan gaji dan dari revisi antar kegiatan antar *output* sehingga menyebabkan adanya Revisi DIPA ke-3 pada tanggal 4 November 2019.

Dari total anggaran di atas telah terealisasi sebesar Rp.74.569.892.000,00 (tujuh puluh empat milyar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), atau 96,12%, dengan realisasi fisik sebesar 100%

Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berjalan secara efektif dan efisien dengan indikasi sebagai berikut:

- 1) Rencana penyerapan anggaran pada TA. 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan di awal tahun yaitu sebesar 99,73% dan rencana fisik sebesar 99,76%. Realisasi penyerapan anggaran di akhir tahun yaitu sebesar 96,12% dengan realisasi fisik sebesar 100% (berdasarkan e-Monitoring Online status tanggal 31 Desember 2019;
  - 2) Pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif walaupun terjadi restrukturisasi organisasi di bulan Februari 2019;
  - 3) Kinerja pelaksanaan anggaran tetap berjalan secara efektif walaupun ada revisi DIPA ke-3 di bulan November yang menyebabkan bertambahnya pagu Anggaran.
- b. Alokasi DIPA Tahun 2020 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan awal yaitu sebesar Rp72.332.494.000,00 (tujuh puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), terdapat perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp67.653.934.000,00 (enam puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Perubahan berasal dari adanya *Refocusing* anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana Covid-19 pada Revisi DIPA ke 2, pada tanggal 27 April 2020.

- 1) Realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp61.069.513.000,00 (enam puluh satu milyar enam puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dengan progress keuangan sebesar 90,29% dan fisik 90,68% (status *ie*-Monitoring Online pada tanggal 13 Januari 2021);
- 2) Adanya bencana Pandemi Covid-19, selain merubah Pagu Anggaran tahun 2020 juga merubah pelaksanaan cara bekerja di beberapa kegiatan seperti pelaksanaan rapat, pelaksanaan diklat, bimbingan teknis/ pelatihan yang semula dilakukan dengan tatap muka secara langsung beralih menjadi pertemuan virtual online melalui video conference, hal ini menjadikan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sehingga berpengaruh juga terhadap realisasi anggaran;

### C. Realisasi Anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki total anggaran awal sebesar Rp72.332.494.000,00 (tujuh puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), kemudian terjadi perubahan anggaran yang bertambah menjadi sebesar Rp67.653.934.000,00 (enam puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Melalui proses *Refocusing* anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana Pandemi Covid-19 (Revisi DIPA ke 2);

Pada akhir tahun anggaran 2020 realisasi anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebesar Rp61.069.513.000,00 (enam puluh satu milyar enam puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dengan progres keuangan sebesar 90,29% dan fisik 90,68% (status *ie*-Monitoring Online pada tanggal 13 Januari 2021).



**Tabel 24**

**Realisasi Anggaran Per-Indikator Kinerja**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sumber : ie-Monitoring Online Tanggal 13 Januari 2020

IKK	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Prosentase (%)	Keu (%)	Fisik (%)
Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	53.332.771.000,00	47.159.437.000,00	88,42	90,29	90,68
Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.432.900.000,00	3.380.597.000,00	98,48		
Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	3.694.953.000,00	3.560.011.000,00	96,35		
Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.867.042.000,00	1.796.398.000,00	96,22		
Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2.523.919.000,00	2.450.383.000,00	97,09		
Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	2.784.349.000,00	2.722.687.000,00	97,79		

**Tabel 25**

**Realisasi Anggaran Per-Komponen**

Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sumber : ie-Monitoring Online Tanggal 13 Januari 2021

IKK	Komponen	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Prosentase
Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	469.400.000,00	458.992.000,00	97,78
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	259.953.000,00	250.817.000,00	96,49
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	2.844.294.000,00	2.826.701.000,00	99,29
	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	2.236.936.000,00	2.236.924.000,00	100,00
	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	1.858.064.000,00	1.858.060.000,00	100,00
	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	410.000.000,00	409.988.000,00	100,00
	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	29.713.794.000,00	23.654.146.000,00	79,96
	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	15.540.330.000,00	15.463.809.000,00	99,51
Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	1.151.281.000,00	1.143.932.000,00	99,36
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	568.121.000,00	550.215.000,00	96,85
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	1.713.498.000,00	1.686.450.000,00	98,42
Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	402.492.000,00	370.012.000,00	91,93
	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	1.432.086.000,00	1.388.671.000,00	96,97
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	1.860.375.000,00	1.801.328.000,00	96,83




IKK	Komponen	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Prosentase
Pekerjaan Umum dan Perumahan				
Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Monev DJPI	1.002.870.000,00	996.346.000,00	99,35
	Jumlah Laporan Keuangan	699.166.000,00	651.126.000,00	93,13
	Jumlah Laporan Kinerja	165.006.000,00	148.926.000,00	90,25
Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	773.966.000,00	771.129.000,00	99,96
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan	1.749.953.000,00	1.679.254.000,00	96,03
Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	1.512.250.000,00	1.470.623.000,00	97,25
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	1.272.099.000,00	1.252.064.000,00	98,43




Dalam upaya pencapaian kinerja yang optimal sepanjang Tahun Anggaran 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah melaksanakan Kegiatan diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 26**

Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Tahun Anggaran 2020





No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
1	Rapat Kerja Evaluasi pelaksanaan Anggaran dan Persiapan Pela Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Bogor Tanggal 16 Desember 2020	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
2	<p>Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyemprotan disinfektan di semua ruangan</li> <li>• Pelaksanaan Rapid Test dan Test Swab Antigen</li> <li>• Pemberian penambahan daya tahan tubuh dengan vitamin</li> </ul>	  

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
3	Rapat Penyederhanaan Birokrasi dan Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Kegiatan Penguatan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Hotel Ambhara Jakarta 12 Februari 2020	
4	Penyusunan Kebutuhan akan Diklat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Hotel GAIA Cosmo Yogyakarta 5 -7 Maret 2020	
6	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Kredit/Pembiayaan Pemilikan dan Pembangunan Rumah bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota POLRI di Ruang Rapat Setditjend Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tanggal 11 Mei 2020	



No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
7	Rapat Pembahasan Prosedur Hukum Penanganan Pengaduan Masyarakat di Qubika Hotel, Tangerang Selatan pada tanggal 2 November 2020	
8	Rapat pembahasan Penajaman Konsep Perlindungan Konsumen Bidang Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Tahun 2020 di Aryaduta Hotel Manado pada tanggal 13 Maret 2020	
9	Rapat Penajaman Usulan Pagu Indikatif TA. 2021 Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di The 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa pada tanggal 4 Februari 2020	
10	Evaluasi Internal Atas Pelaksanaan SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA.2019 di Hotel Veranda Jaksel, pada Tanggal 4 Agustus 2020	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
13	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran Semester II DJPI di Ruang Rapat Lantai 9 Gedung ATR BPN, pada Tanggal 18 Juni 2020	
12	Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Anggaran DJPI TA. 2020 di Melia Purosani Hotel, Yogyakarta, pada Tanggal 9 November 2020	
13	Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Pandemi Covid di The Alana Hotel and Conference Center, Sentul pada tanggal 27-28 Agustus 2020	
14	Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Tahun 2020 di Hotel Alana Sentul City, pada Tanggal 13 November 2020	

No	Kegiatan	Foto Dokumentasi
15	Koordinasi Tim Satgas SPIP TA.2020 di Amartahills, Malang pada tanggal 18 s.d. 20 November 2020	

**D. Rekomendasi Evaluatan atas Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Sebelumnya (2019)**

**Tabel 27**

Rekomendasi Evaluatan atas Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2019

KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menambahkan ukuran atau parameter keberhasilan untuk tujuan/hasil program dan praktik-praktik terbaik yang telah dicapai didalam Renstra (Contoh Laporan World Bank Performance Expenditure Review)</li> <li><b>Cascading</b> kinerja instansi sampai individu belum seluruhnya menggambarkan proses keterkaitan antar level jabatan dalam mewujudkan kinerja.</li> <li>Perencanaan kinerja pada unit kerja belum sepenuhnya dijabarkan pada dokumen penganggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penjabaran perencanaan sudah berbasis <i>outcome</i></li> <li>Dalam proses penyusunan Cascading kinerja hingga level individu, berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian dalam penyusunan karena terkait dengan Struktur Organisasi dan Penilaian Kinerja Individu (SKP)</li> </ul>



KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan <i>reward dan punishment</i> pada monitoring rencana kinerja dan memasukkan hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan pada Pemanfaatan Rencana Aksi atas Kinerja</li> </ul>	
Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun pedoman atau SOP dalam pengumpulan dan/atau pengolahan data kinerja untuk memudahkan apabila ditemukan kesalahan dalam proses pengolahan data kinerja tersebut</li> <li>Sistem aplikasi pemantauan kinerja yang digunakan belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan kinerja unit kerja</li> <li>Melakukan Review dan Evaluasi berkala terhadap implementasi SOP Pengukuran Kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SOP sudah disusun dan sedang menunggu kompilasi satu Unor dari Bagian Kepegawaian</li> <li>Sistem E-Sakip sudah dimanfaatkan untuk mengupdate progress pengukuran kinerja secara berkala</li> <li>Evaluasi SOP belum dilaksanakan karena SOP masih dalam proses kompilasi</li> </ul>

## E. Perubahan di Tahun Anggaran 2020

Semua Unit Kerja di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami beberapa perubahan di Tahun Anggaran 2020, begitu juga yang terjadi di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Beberapa perubahan yang terjadi di Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu sebagai berikut:

## **1) Perubahan Struktur Organisasi di Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terbit pada tanggal 12 Mei 2020 menggantikan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2019 merubah struktur organisasi di Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang semula berjumlah 4 (empat) bagian berkurang menjadi 3 (tiga) bagian. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian dengan kondisi baru terutama di 2 (dua) bagian baru yaitu Bagian Perencanaan Program dan Keuangan serta Bagian Kepegawaian dan Umum.

Secara rinci perubahan Struktur Organisasi yang terjadi sebagai berikut:

- SOTK Lama sesuai Permen-PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR:
  - Terdiri dari 4 (empat) orang Pejabat Eselon 3:
    - Kepala Bagian Anggaran dan Evaluasi;
    - Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala;
    - Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik;
    - Kepala Bagian Keuangan dan Umum.
  - Terdiri dari 12 (dua belas) Pejabat Eselon 4 :
    - Bagian Anggaran dan Evaluasi : 3 (tiga) orang Kasubbag;
    - Bagian Kepegawaian dan Ortala : 3 (tiga) orang Kasubbag;
    - Bagian Hukum dan Komunikasi Publik : 3 (tiga) orang Kasubbag;
    - Bagian Keuangan dan Umum : 3 (tiga) orang Kasubbag.
- SOTK Baru Sesuai Permen-PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR:
  - 3 (tiga) orang Pejabat Eselon 3 :
    - Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan;
    - Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.
  - Terdiri dari 12 (dua belas) Orang Subkoordinator dengan rincian sebagai berikut:
    - Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan : 5 (lima) orang Subkoordinator
    - Bagian Kepegawaian dan Umum : 1 (satu) orang Koordinator dan 4 (empat) orang Subkoordinator
    - Bagian Hukum dan Komunikasi Publik : 3 (tiga) orang Subkoordinator.
  - Terdapat 24 (dua puluh empat) orang Jabatan Fungsional

(1 orang Jabatan Fungsional merangkap sebagai Koordinator dan 12 (dua belas) orang Jabatan Fungsional merangkap sebagai Sub Koordinator)

## **2) Perubahan Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari tingkat Kementerian sampai dengan tingkat Unit Kerja Eselon 2 telah mengalami perubahan Rencana Strategis periode 5 (lima) tahunan. Begitu juga di Unit Kerja Eselon II Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2015-2019 berubah menjadi Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020-2024.

## **3) Perubahan Pagu Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Pada awal tahun anggaran 2020 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal sejumlah Rp72.332.494.000,00 (tujuh puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Terdapat perubahan karena adanya *Refocusing* anggaran untuk mengakomodir kebutuhan anggaran dalam penanganan bencana Covid-19 pada Revisi DIPA 2 menjadi sebesar Rp67.653.934.000,00 (enam puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

## **4) Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Revisi DIPA mengakibatkan adanya perubahan Perjanjian Kinerja selama tahun 2020 sebagaimana kronologi di bawah:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama tahun 2020 menyusun perjanjian kinerja (PK) sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama, PK awal pada bulan Januari 2020 antara Sesditjen PI dengan Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan. Disusun berdasarkan DIPA awal yaitu

dengan pagu anggaran sejumlah Rp72.332.494.000,00 (tujuh puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Kedua, PK revisi pertama pada bulan April 2020 antara Sesditjen PI dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dirjen PI). Perjanjian kinerja ini disusun karena adanya *Refocusing* anggaran untuk pemenuhan anggaran penanganan Covid-19 pada Revisi DIPA 2 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp67.653.934.000,00 (enam puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Ketiga, PK revisi kedua yang terbit pada tanggal 26 Oktober 2020 antara Sesditjen PI dengan Dirjen PI. Penyusunan PK revisi kedua setelah terbitnya Renstra Kementerian sampai dengan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan anggaran mengacu pada DIPA Revisi ke-4 terkait adanya pergeseran antar output dengan pagu anggaran Rp67.653.934.000,00 (enam puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

**5) Perubahan Cascading sebagai Metode Perhitungan Capaian Kinerja sesuai dengan Renstra Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**

- Terdapat perubahan dimana jumlah Output Kegiatan (Komponen) pada DIPA Tahun 2020 yaitu sebanyak 13 (tiga belas) berubah menjadi 21 pada Renstra DJPI tahun 2020-2024 di Tahun Anggaran 2020;
- Belum dimasukkan 2 (dua) Output Kegiatan/ Rincian Output (komponen) ke dalam Metode Perhitungan dalam Renstra DJPI tahun 2020-2024 di Tahun Anggaran 2020 yaitu Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI (Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN) serta Laporan Keuangan Unit Eselon I (Jumlah Laporan Keuangan), sehingga perlu dibuat cascading yang sesuai dengan memasukkan 2 (dua) Output Kegiatan/ Rincian Output (komponen) tersebut ke dalam Metode Perhitungan Renstra DJPI tahun 2020-2024 di Tahun Anggaran 2020 dimana masing-masing dimasukkan ke dalam perhitungan IKK 1 (satu) yaitu Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan) serta IKK 4 (empat) yaitu Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Adanya perbedaan target jumlah Laporan (Paket Kegiatan/ Sub Komponen) untuk Output Kegiatan/ RO (Komponen) Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I Jumlah Laporan

Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan pada Renstra DJPI tahun 2020-2024 di Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah paket kegiatan yang tercantum dalam DIPA 2020

**6) Perubahan Cara Bekerja dan Adaptasi New Normal:**

- Perubahan cara bekerja menjadi sistem kerja Work From Home (WFH);
- jumlah pegawai yang melaksanakan pekerjaan di kantor (Work From Office / WFO) dibatasi hanya 25 % dari total keseluruhan pegawai yang ada;
- Pelaksanaan kegiatan yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka langsung berubah menjadi daring/ online.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah melaksanakan kegiatan dalam mendukung tercapainya target kinerja pada Tahun Anggaran 2020 dengan baik meliputi capaian administrasi dan penyelesaian fisik, seperti terlihat dalam capaian kinerja indikator kegiatan (*output* kegiatan) sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020.

#### **A. Permasalahan**

Dalam melaksanakan kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Beberapa permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Adanya bencana Pandemi Corona Virus 2019 (COVID 19) menjadi salah satu penghambat tercapainya kinerja khususnya pada paket kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis yang mana mengharuskan adanya interaksi langsung antara mentor dengan peserta dan tidak bisa melalui video conference pada beberapa kegiatan diklat maupun bimtek.
2. Perubahan struktur organisasi di Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang semula berjumlah 4 (empat) bagian berkurang menjadi 3 (tiga) bagian menyebabkan diperlukannya penyesuaian dengan kondisi baru terutama di 2 (dua) bagian yang baru yaitu Bagian Perencanaan Program dan Keuangan serta Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. Terbatasnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai personil pelaksanaan pengelolaan keuangan negara sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003, sehingga PNS yang mendapat beban tugas di unit kerja kesatkeran sebagai pengelola keuangan. Hal ini berakibat pekerjaan struktural terganggu, disebabkan pegawai yang bersangkutan menjadi lebih berkonsentrasi pada pekerjaan kesatkeran.
4. Tingkat pemahaman pegawai pada tugas dan fungsi belum optimal, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
5. SOP yang disusun belum disosialisasikan dengan baik, sehingga belum dipahami ataupun pegawai tidak peduli akan SOP yang ada.
6. Terbatasnya Anggaran untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan perkantoran dan pemeliharaan gedung.

## B. Tindak Lanjut

Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti disebutkan di atas maka diperlukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Diperlukan strategi dan sistem yang tepat untuk mengantisipasi masih berlanjutnya pandemi Covid-19 agar pelaksanaan Bimtek dan Pelatihan tetap berjalan dengan baik dan sesuai rencana;
2. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengusulkan tambahan pengadaan PNS untuk memenuhi kebutuhan yang ideal sesuai beban kerja berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di DJPI;
3. Masing-masing Unit Kerja menyusun SOP sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR, dan melakukan evaluasi atas SOP yang telah disusun. Dengan demikian pegawai dapat memaknai SOP yg telah disusun, selanjutnya diharapkan tugas dan fungsi yang ada dapat dilaksanakan sesuai SOP dan memberikan *output* dan hasil kerja yang optimal.
4. Meningkatkan kompetensi pegawai, dengan mengikutsertakan dalam pelatihan atau melalui diklat-diklat yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR, dan Instansi lainnya, maupun berdasarkan masukan kebutuhan akan diklat di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
5. Melakukan pemetaan Jabatan Fungsional (JF), penyesuaian tugas dan fungsi Pejabat Struktural dan Formasi Jabatan, di mana Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengusulkan Jabatan Fungsional baru yang belum ada di Badan Kepegawaian Negara dan Kemen Pan-RB;
6. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagai salah satu acuan untuk perbaikan kinerja di tahun berikutnya;
7. Perlunya evaluasi internal secara berkala untuk memonitor capaian kinerja, tidak hanya melihat dari sisi penyerapan anggaran tetapi juga output/outcome yang telah/ belum tercapai (dihasilkan);
8. Melakukan komunikasi dengan pimpinan unit kerja yang ada di lingkungan DJPI agar dapat menghadirkan pegawai dalam acara pembinaan, bimtek, fasilitasi dan sosialisasi agar hal yang disampaikan dalam salah satu acara tersebut dapat dipahami oleh pegawai dan selanjutnya dapat dilaksanakan;
9. Menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh seluruh pegawai melalui naskah dinas kepada pimpinan unit kerja dan pengumuman di majalah dinding.



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

# LAMPIRAN LAPORAN KINERJA

SETDITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

## 1) Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tahun Anggaran 2020

### a. Dokumen Perjanjian Kinerja yang Terbit pada Awal Bulan Januari Tahun 2020

  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Irma Yanti**  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

  
**EKO D. HERIPOERWANTO**

Jakarta, Januari 2020  
Pihak Pertama

  
**IRMA YANTI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>			
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Eselon I	1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal 3) Layanan Perkantoran	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

**Kegiatan**  
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan

  
**EKO D. HERIPOERWANTO**

**Anggaran**  
**Rp 72.332.494.000,00**

Jakarta, Januari 2020  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan

  
**IRMA YANTI**

- b. Dokumen Perjanjian Kinerja Setditjen PI Revisi ke-1 yang Terbit pada Bulan April Tahun 2020

REVISI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Irma Yanti**  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



**EKO D. HERIPOERWANTO**

Jakarta, April 2020  
Pihak Pertama



**IRMA YANTI**

REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>			
1	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Eselon I	1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		3) Layanan Perkantoran	1 Layanan

**Kegiatan**  
Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan



**EKO D. HERIPOERWANTO**

**Anggaran**  
**Rp67.635.934.000,00**

Jakarta, April 2020  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan



**IRMA YANTI**

1) Dokumen Perjanjian Kinerja Setditjen PI Revisi ke-2 pada tanggal 26 Oktober 2020



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irma Yanti  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Eko D. Heripoerwanto  
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
  
**EKO D. HERIPOERWANTO**

Jakarta, 26 Oktober 2020  
Pihak Pertama  
  
**IRMA YANTI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
<b>SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	50,40%	55,92%
<b>SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</b>		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	13,5%	13,5%
<i>IKK. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	15%	15%
<i>IKK. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	10%	10%
<i>IKK. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	10%	10%
<i>IKK. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	15%	15%
<i>IKK. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik</i>	10%	10%

**KEGIATAN**

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

**ANGGARAN**

Rp67.635.934.000,00

JAKARTA, 26 OKTOBER 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN  
  
**EKO D. HERIPOERWANTO**

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN  
  
**IRMA YANTI**



2) Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tahun Anggaran 2020

**BERITA ACARA KESEPAKATAN**

No.: /BA/Pk/2020

**CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 bertempat di Hotel Sotis Kemang telah diadakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020, Rapat pembahasan dimaksud untuk menghasilkan kesepakatan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Anggaran Masing-Masing Bagian di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020:

No.	Sasaran Program	Pagu (Rp 000,00)	Realisasi (Rp 000,00)	Keuangan		Fisik		Capaian (%)
				RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bagian Perencanaan Program Dan Keuangan	4,650,914	4,497,598	100%	97%	100%	98%	98%
2	Bagian Kepegawaian Dan Umum	56,767,771	50,468,631	100%	89%	100%	90%	90%
3	Bagian Hukum Dan Komunikasi Publik	6,217,249	6,103,284	100%	98%	100%	99%	99%
<b>TOTAL</b>		<b>67.635.934</b>	<b>61.069.513</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>

2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	13,5%	13,50%
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	15%
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10%	10%
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15%	14,25%
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10%	10%

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020 ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, Januari 2020

Yang Menyepakati,

Kepala Bagian  
Perencanaan Program  
dan Keuangan



Eko Suhendratma

Kepala Bagian  
Kepegawaian dan Umum



Dessy Nina Wulandari

Kepala Bagian  
Hukum dan Komunikasi Publik



Dedy Slamet Budisusetyo

Mengetahui,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan  
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Irma Yanti

### 3) Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020

#### 1) Dokumen DIPA Setditjen PI Awal yang Terbit pada Bulan Januari Tahun 2020

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2020 IA. INFORMASI KINERJA					
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT					
Unit Organisasi : (16) DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN					
Provinsi : (01) DKI JAKARTA					
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN					
Kuasas Pengguna Anggaran : Ir. Arvi Argyantoro, MA					
Bendahara Pengeluaran : Mochamad Resya Choriawan					
Pejabat Penanda Tangan SPM : Kurniawan Tri Utomo, S.Ikom					
Halaman : IA. 5					
Output Program	03	Output Internal Eselon I			
Indikator Output Program	01	Jumlah Layanan Internal	1	Layanan	
Kegiatan	4194	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			72.332.494.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Eselon I			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi			
	02	Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian			
	03	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan			
	04	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan			
	05	Jumlah Laporan Pelayanan Hukum			
	06	Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Protokol			
	07	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Anggaran			
	08	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			
Output Kegiatan	4194.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan		22.573.370.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	3	Laporan	
	02	Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian	3	Laporan	
	03	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan	6	Laporan	
	04	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan	3	Laporan	
	05	Jumlah Laporan Pelayanan Hukum	3	Laporan	
	06	Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Protokol	5	Laporan	
	07	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Anggaran	2	Laporan	
	08	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	3	Laporan	
Output Kegiatan	4194.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan		4.505.000.000
Indikator Output Kegiatan	02	Jumlah Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi = xx unit	1	Layanan	
	03	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	1	Layanan	
	05	Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	1	Layanan	
Output Kegiatan	4194.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		45.254.124.000
Indikator Output Kegiatan	01	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx%	1	Layanan	
	02	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%	1	Layanan	

Jakarta, 12 November 2019  
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIS JENDERAL  
ttd.  
Prof. ANITA FIRMAN TI  
NIP. 196006151987032001

#### 2) DIPA Setditjen PI Revisi ke-2 yang Terbit pada Tanggal 27 April 2020

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : DIPA- 033.16.1.631003/2020 IA. INFORMASI KINERJA					
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT					
Unit Organisasi : (16) DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN					
Provinsi : (01) DKI JAKARTA					
Kode/Nama Satker : (631003) PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN					
Kuasas Pengguna Anggaran : Ir. ARVI ARGYANTORO, MA					
Bendahara Pengeluaran : MOCHAMAD RESYA CHORIAWAN					
Pejabat Penanda Tangan SPM : KURNIAWAN TRI UTOMO, S.IKOM					
Halaman : IA. 5					
Indikator Output Kegiatan	01	Layanan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	8.460	Rumah Tangga	
Output Kegiatan	4199.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		1.000.000.000
Indikator Output Kegiatan	02	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%	1	Layanan	
Output Program	03	Output Internal Eselon I			
Indikator Output Program	01	Jumlah Layanan Internal	1	Layanan	
Kegiatan	4194	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			67.635.934.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Eselon I			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi			
	02	Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian			
	03	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan			
	04	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan			
	05	Jumlah Laporan Pelayanan Hukum			
	06	Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Protokol			
	07	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Anggaran			
	08	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			
Output Kegiatan	4194.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan		17.876.810.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	3	Laporan	
	02	Jumlah Laporan Pengelolaan Kepegawaian	3	Laporan	
	03	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan	6	Laporan	
	04	Jumlah Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan	3	Laporan	
	05	Jumlah Laporan Pelayanan Hukum	3	Laporan	
	06	Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Protokol	5	Laporan	
	07	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Anggaran	2	Laporan	
	08	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	3	Laporan	
Output Kegiatan	4194.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan		4.505.000.000
Indikator Output Kegiatan	02	Jumlah Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi = xx unit	1	Layanan	
	03	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	1	Layanan	
	05	Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	1	Layanan	

**4) Daftar Sarana dan Prasarana di Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan  
Tahun 2020**

Tabel Rekap Barang BMN Setditjen PI Tahun 2020

NO	Nama Barang	Jumlah (Buah)
1	Lemari Besi/Metal	20
2	Lemari Kayu	13
3	Rak Besi	21
4	Filing Cabinet Besi	5
5	Laci Box	2
6	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	2
7	CCTV - Camera Control Television System	4
8	Alat Penghancur Kertas	9
9	White Board Electronic	3
10	Laser Pointer	6
11	LCD Projector/Infocus	7
12	Softboard	1
13	Acces Control System	3
14	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5
15	Meja Kerja Kayu	75
16	Meja Rapat	8
17	Meja Komputer	1
18	Meja Makan Kayu	12
19	Kursi Fiber Glas/Plastik	181
20	Cubikal	69
21	Air Cleaner	17
22	Lemari Es	2
23	A.C. Sentral	21
24	A.C. Split	13
25	Kipas Angin	2
26	Exhause Fan	3
27	Kitchen Set	3
28	Televisi	20
29	Sound System	1
30	Wireless	1
31	Mic Conference	1
32	Camera Video	2
33	Voice Recorder	10
34	Tripod Camera	2
35	Lensa Kamera	6
36	Camera Adaptor	1
37	Camera Digital	11
38	Camera Conference	1
39	Mesin Jilid	2



NO	Nama Barang	Jumlah (Buah)
40	Handy Talky (HT)	20
41	Unit Remote Control	6
42	Elektrik Thermometer	3
43	Mini Komputer	4
44	P.C Unit	81
45	Note Book	20
46	Tablet PC	17
47	Monitor	3
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18
49	Handy Cam	1
50	Meja Receptionis	5
51	Meubelair Lainnya	1
52	Dispenser	1
53	Lampu Blitz	1
54	Mesin Barcode	4

#### 5) Daftar Sisa Barang Persediaan Setditjen PI Tahun Anggaran 2020

Tabel Rekap Sisa Barang Persediaan Setditjen PI Tahun 2020

No	Nama Barang	Jumlah
1	Stabillo Boss (satuan)	5
2	Pensil faber castell	2
3	Spidol Snowman White board Hitam	1
4	Bak Stempel Sedang	1
5	Binder Clip No. 105	10
6	Binder Clip No. 260	5
7	Trigonal Klip Satuan	4
8	Penghapus Pensil Faber Castell	29
9	Buku Faktur SSP	7
10	buku ekspedisi	8
11	Map Diamond 5002	1
12	Map Bening Daichi A4 L siku Pak	3
13	Map Bening Daichi F4 L siku Pak	3
14	PP Poket F4 Bindek	4

No	Nama Barang	Jumlah
15	Map Ditjen Pembiayaan Infrastruktur	80
16	Gunting Sedang	4
17	Cutter Besar L500	8
18	isi cutter joyko A100	1
19	Lem Stik	42
20	Celotape Panfik	5
21	Post It 654	10
22	Post It 670	3
23	Lakban Hitam Besar (2"/5cm)	3
24	Solatip Kertas Kecil	6
25	Label / stiker CD	2
26	Label Tom & Jerry No.103	25
27	Isolasi Coklat Besar	2
28	Kertas Label Tom And Jerry No. 127	10
29	Doubletape 3M Besar	10
30	Stapler Mx HD No.10	5
31	Isi Stapler Max HD No.10 Satuan	10
32	Kertas Kop Surat Ditjen Pembiayaan Infrastruktur	5
33	Kop Surat Satker Pembiayaan Infrastruktur	5
34	Kertas Pembatas A4 warna Biru	4
35	Kertas Foto A4	7
36	Amplop Ditjen ukuran Cabinet (pcs)	100
37	Guide Arsip	1.000
38	Toner HP LaserJet 304A (Black)	1
39	Toner HP LaserJet 304A (Magenta)	1
40	Toner Hp 83A	4
41	Toner Hp 305 Black	1
42	Toner Hp Laserjet 126A (Ce 310A) Black	1
43	Toner Hp Laserjet 126A (Ce 313A) Magenta	1

No	Nama Barang	Jumlah
43	Toner Hp Laserjet 126A (Ce 313A) Yellow	1
44	Toner Hp Isj 204 Black	1
45	Toner Hp Isj 204 Yellow	1
46	Toner Hp 48a	4
47	Toner Hp Laserjet 975X black	2
48	Toner Hp Laserjet 975X Yellow	1
49	Toner Hp Laserjet 975X Magenta	1
50	Toner Laserjet Hp 79A	5
51	Toner HP 202A Black	1
52	Toner HP 202A Cyan	1
53	Toner HP 202A Magenta	1
54	Toner HP 202A Yellow	1
55	Toner Brother 263CC Black	1
56	Toner Brother 263CC Cyan	1
57	Toner Brother 263CC Yellow	1
58	Toner Brother 263CC Magenta	1
59	Toner Brother DR 451 Black	1
60	Toner Brother DR 451 Cyan	1
61	Toner Brother DR 451 Magenta	1
62	Toner Brother DR 451 Yellow	1
63	Toner Brother TN 1080	1
64	tempat CD plastik	50
65	Batu Baterai AA (pak)	2
66	Stempel Kayu	1

**1. Foto Dokumentasi Kegiatan Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020**

**A. Bagian Kepegawaian dan Umum**

**1) Laporan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi**

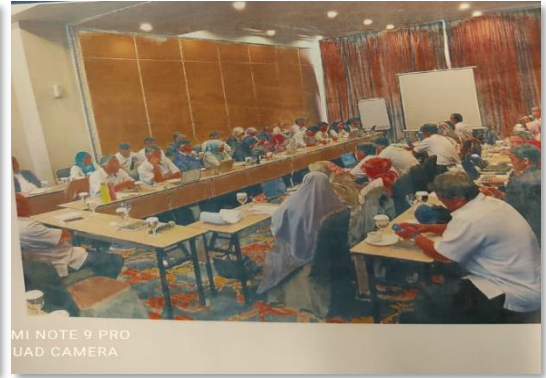
- a. Penguatan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan



Rapat Penyederhanaan Birokrasi dan Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Kegiatan Penguatan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Hotel Ambhara Jakarta pada tanggal 24 Januari 2020



Rapat Penyesuaian Perhitungan Kembali Terhadap Analisa Jabatan / Analis Beban Kerja Masing-masing Unit Kerja di Hotel Grandika Jakarta pada Tanggal 12 Februari 2020



Rapat Penyesuaian Perhitungan Kembali Terhadap Analisa Jabatan / Analis Beban Kerja  
Masing-masing Unit Kerja di Hotel Aviary Bintaro pada tanggal 13-24 Januari 2020



Reviu Hasil Penyesuaian Perhitungan Kembali  
Terhadap Analisa Jabatan / Analis Beban Kerja  
di Hotel Griya Persada Bandungan  
pada tanggal 19-21 Februari 2020



Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyusunan  
Naskah Akademik Jabatan Fungsional Analis  
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan  
Perumahan di Grand Royal Safari Garden Bogor  
pada tanggal 13-14 Agustus 2020



Pembahasan Bahan Persiapan Ekspose Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan  
Umum Dan Perumahan Shappire Sky Hotel BSD Pada Tanggal 20 Oktober 2020





Rapat Pembahasan Naskah Akademis Bidang PUPRdi Hotel Santika BSD  
pada tanggal 21 Oktober 2020



Rapat Konsinyasi Naskah Akademik Usulan  
Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan  
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
di Hotel Amanuba Bogor  
pada tanggal 13-14 Oktober 2020

Rapat Pembahasan Lanjutan Naskah Akademis  
Jabatan Fungsional Tbp, Penyedia Perumahan dan  
Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum  
dan Perumahan di Hotel Cirebon  
pada tanggal 5-7 November 2020

b. Penyusunan Ketatalaksanaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur  
Pekerjaan Umum dan Perumahan



Pembahasan Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko Hotel Ambhara Jakarta 12 Februari 2020



Rapat Penyederhanaan Birokrasi dan Pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Kegiatan Penguatan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Hotel Ambhara Jakarta 12 Februari 2020



Rapat Penyusunan Draft Awal Naskah Akademis Jabatan Fungsional Kegiatan Penyusunan Ketatalaksanaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Hotel Aviari Tangerang 12-13 Maret 2020

Rapat Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Hotel Grand Zuri BSD pada Tanggal 29 September 2020



Rapat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Hotel Grand Zuri BSD pada tanggal 30 September 2020

Rapat Pembahasan Persiapan Ekspose Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Hotel Rancamaya Bogor pada Tanggal 2 Oktober 2020





Rapat Penyusunan SOP Bagian Kepegawaian dan Umum Hotel Savero Bogor 19-21 Juli 2020



Penyusunan Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja untuk Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Hotel Atlantic City Bandung pada tanggal 26-27 November 2020

Rapat Pembahasan Lanjutan Naskah Akademis dan Pembentukan Baru Jabatan Fungsional Bidang PUIPR dengan Menpan di Hotel Santika Premiere Tangerang pada Tanggal 19 September 2020



Penyusunan Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja untuk Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Hotel Amanuba Hotel & Resort Rancamaya di Bogor pada Tanggal 12-13 Oktober 2020.



c. Fasilitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Rapat Internalisasi Reformasi Birokrasi DJPI Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Hotel Ambhara Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2020



Penyusunan Buletin Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Hotel Grand Tebu Bandung pada tanggal 09-11 November 2020.

## 2) Laporan Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian

### a. Pelaksanaan Pembinaan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan  
Umum dan Perumahan  
di Hotel GAIA Cosmo Yogyakarta 5 -7 Maret  
2020



Rapat Pembinaan Penyusunan Target Sasaran  
Kerja Pegawai (SKP) Bagian Kepegawaian dan  
Umum Periode Juli s.d. Desember 2020 dan  
Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30  
Tahun 2019 dengan Aplikasi Zoom  
pada tanggal 25 September 2020



Rapat Pembinaan Penyusunan Target Sasaran  
Kerja Pegawai (Skp) Dan Penilaian Evaluasi  
Kinerja Pegawai Tahun 2020  
di Hotel Jambu Luwuk pada tanggal 21  
Oktober 2020



Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Persiapan  
Pelatihan Finon di Hotel Jambu Luwuk pada  
tanggal 22-23 Oktober 2020

- b. Penyelenggaraan Administrasi dan Pemutahiran Data Kepegawaian Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Konsinyasi Tunjangan Kinerja dan Uang Makan  
Bulan September Hotel Royal Tulip pada  
tanggal 26-29 Juli 2020



Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Persiapan  
Pelatihan Finon Hotel Veranda  
pada Tanggal 1 September 2020

### 3) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tata Naskah Dinas Elektronik dan Arsip

- a. Pengelolaan Arsip dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Bimtek Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Hotel Santika Cirebon pada bulan Juli 2020

- 4) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan
- a. Dukungan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung dan Pengamanan



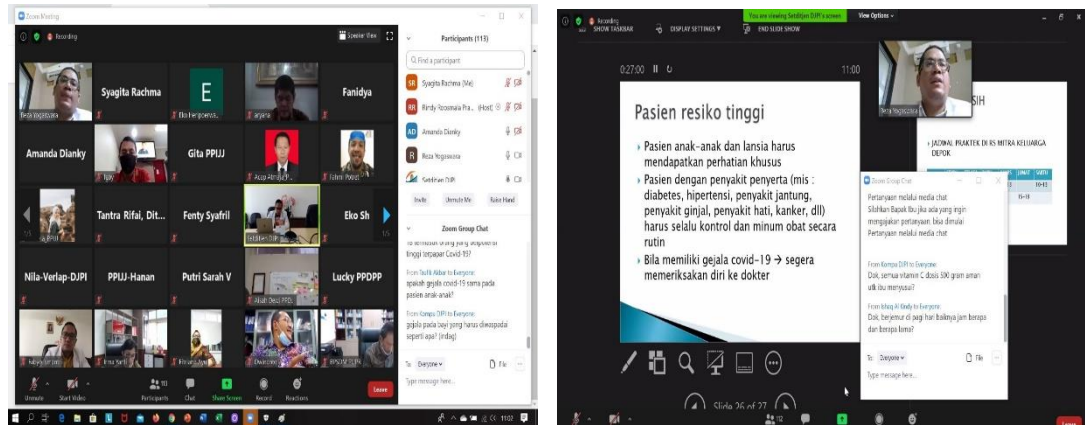
Peningkatan Pelayanan satuan Satpam dan Pengemudi  
di Hotel Jambuluwuk Bogor, pada tanggal 20 - 22 November 2020

- b. Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di lingkungan Ditjen  
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Penanganan bahaya Pandemi Corona Virus  
Disease 2019 (Covid-19)





Seminar Kesehatan 1 via Zoom pada tanggal 5 Juni 2020



Seminar Kesehatan 2 via Zoom dan di Ruang Rapat Lantai 9 DJPI Kementerian PUPR pada tanggal 25 Juni 2020

## C. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

### 1) Laporan Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

- a. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bidang Pembiayaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020



Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Kredit/Pembiayaan Pemilikan dan Pembangunan Rumah bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota POLRI di Ruang Rapat Setditjend Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tanggal 11 Mei 2020;



Rapat Pembahasan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan di Ruang Rapat Setditjend Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tanggal 19 Mei 2020



Rapat Pembahasan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bidang Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan  
di The Yonan Hotel Bogor pada tanggal 23-25 September 2020



FGD Pemetaan Kebijakan Pasca Penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja di Hotel Grand Prioritas  
Bogor pada tanggal 15 - 17 Oktober 2020

b. Pembinaan dan Pendampingan Peraturan Perundang-Undangan



Workshop DJPI Berkarya Konsumen Ceria di Hotel Harris, Pontianak  
pada tanggal 27-28 Februari 2020





Rapat Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pembiayaan Inf. PU & Perumahan di Dharmein Hotel, Jakarta pada tanggal 30 September 2020



Sosialisasi Penyampaian Informasi atas Substansi Undang-Undang Cipta Kerja Terkait dengan Kemudahan Investasi Dalam Pembangunan Inf. PUPR melalui KPBU di Ambhara Hotel, Jakarta pada tanggal 12 November 2020

c. Fasilitas Penyusunan NSPK Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020



Rapat Persiapan FGD Perlindungan Konsumen Bidang Perumahan di Hotel Dharmein, Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020





Rapat Pembahasan Fasilitas Penyusunan NSPK Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di New Griya Inkoppabri, Bogor pada tanggal 7-9 Oktober 2020



Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tabungan Perumahan Rakyat di Hotel Dharmein, Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2020

## 2) Laporan Pelayanan Hukum

- a. Pendampingan Hukum Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020



Rapat pembahasan masukan terhadap tahap penyusunan Peraturan Perundang-Undangan pada revisi Peraturan Menteri di Desa Alamanis Resort Villa, Cirebon pada tanggal 28-29 Juli 2020



Rapat koordinasi Perlindungan Konsumen Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 di Pullman Hotel Jakarta, pada tanggal, 7 September 2020



FGD Penyusunan Draft PKS Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Rizen Padjadjaran Hotel, Bogor pada tanggal 23-25 November 2020

b. Pembinaan Kerjasama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020



Rapat Pembahasan Verifikasi Dokumen Pernyataan Minat Bank Pelaksana Penyalur KPR Bersubsidi dan BP2BT di Ruang Rapat Setditjend Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, pada tanggal 6 April 2020; pada tanggal 23-25 November 2020



Rapat Pembahasan Perlindungan Konsumen Bidang Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan di The Yonan Hotel, Bogor pada tanggal 26-28 Agustus 2020



Rapat Pembahasan Format Draft PKO Bidang Infrastruktur PUPR di House Sangkuriang, Bandung pada tanggal 26-28 Oktober 2020



Rapat Pembahasan Prosedur Hukum Penanganan Pengaduan Masyarakat di Qubika Hotel, Tangerang Selatan pada tanggal 2 November 2020



c. Pembinaan Advokasi Hukum Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020



Workshop DJPI Berkarya, Konsumen Ceria di Hotel Grand Daffam Rohan, Yogyakarta, pada tanggal 13- 14 Februari 2020



Rapat Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40 Tahun 2015 di Hotel Dharmein pada tanggal Jakarta, pada tanggal 9 September 2020.

3) Laporan Humas dan Protokol

a. Pelayanan Pengaduan Masyarakat Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020



Rapat pembahasan Penajaman Konsep Perlindungan Konsumen Bidang Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Tahun 2020 di Aryaduta Hotel Manado pada tanggal 13 Maret 2020



Rapat Pembahasan majalah VFM (Value for Money ) Edisi II di Ruang Rapat Setditjend Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tanggal 18 Mei 2020



Rapat Koordinasi penanganan Pengaduan Masyarakat bidang pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan di The Anty Resort Puncak, Bogor pada tanggal 12-14 Agustus 2020

b. Pengelolaan Media Kreatif Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020



Rapat Pembahasan Workshop Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Tahun 2020 di Taman Aer Hotel, Bogor pada tanggal 30-31 Januari 2020;





Workshop Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat  
di Aryaduta Hotel pada tanggal Manado, 11-13 Maret 2020

d. Layanan Kehumasan Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020



Rapat Pembahasan Materi Majalah Value For Money (VFM) Tahun 2020 di Ruang Rapat Setditjend  
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  
pada tanggal 23 Maret 2020



Rapat Persiapan Press Conference di Ruang Rapat Setditjend Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan  
Umum dan Perumahan, 26 Maret 2020

## C. Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

### 1) Laporan Penyusunan Rencana Anggaran

- a. Penyusunan dan Koordinasi Rencana Kerja Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2021



Rapat Penajaman Usulan Pagu Indikatif TA. 2021 Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di The 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa pada tanggal 4 Februari 2020



Sosialisasi Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) TA. 2021 di Ruang Rapat Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tanggal 21 Juli 2020;

## 2) Laporan Kinerja Unit Eselon II

### a. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PIPUP TA.2020



Evaluasi Internal Atas Pelaksanaan SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan TA.2019 di Hotel Veranda Jaksel, pada Tanggal 4 Agustus 2020



Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Ibis Styles Bogor Raya Jl. Golf Estate Bogor Raya, Sukaraja, Kec. Sukaraja, Bogor, Jawa Barat 16710 pada Tanggal 22 Desember 2020



### 3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

#### a. Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA.2020



Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Anggaran DJPI TA. 2020 di Melia Purosani Hotel, Yogyakarta, pada Tanggal 9 November 2020

#### b. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA.2020



Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran Semester II DJPI di Ruang Rapat Lantai 9 Gedung ATR BPN, pada Tanggal 18 Juni 2020



Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan III dan Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran DJPI TA. 2020 di Grand Zuri, BSD City Tangerang Selatan, pada Tanggal 22 Oktober 2020

#### 4) Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

- a. Penyusunan Pengelolaan Administrasi Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA.2020



Identifikasi Kebutuhan Revisi DIPA Thn 2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, di RR. 1 DJPI pada bulan Juli 2020



Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Pandemi Covid di The Alana Hotel and Conference Center, Sentul pada tanggal 27-28 Agustus 2020





Pembahasan Usulan Revisi POK terakhir dan Drop Loan NAHP di Lingkungan DJPI TA 2020 di Yogyakarta pada tanggal 8-12 November 2020

b. Dukungan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal



Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA. 2020 di Hotel Grand Zuri BSD pada tanggal 23 Oktober 2020



Kegiatan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan TA 2019 di Hotel Sahira Bogor pada tanggal 12-14 Maret 2020;

c. Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Satuan Kerja Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Kegiatan Sharing Session Pengadaan Barang/Jasa pada Masa Pandemi COVID-19 (Via Zoom)



Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I dan II TA. 2020 di Ruang Rapat Lantai 9 DJPI



Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Tahun 2020  
Hotel Alana Sentul City, 13 November 2020



5) Laporan Keuangan

- a. Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2020



Koordinasi & Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester 2 TA.2019 R di Hotel Rancamaya Bogor pada tanggal 23 s.d. 24 Januari 2020



Bimbingan Teknis Aplikasi dan Pengelolaan Persediaan di Hotel Santika Bintaro pada tanggal 27 Februari 2020



Rapat Pembahasan Tindak Lanjut LHP BPK Pada Satker BLU PPDPP di RR 1 DJPI Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2020;



Konsolidasi dan Konsinyasi Tindak Lanjut LHP BPK TA 2019 pada SATKER di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan di Swissbell-Inn, Bogor pada tanggal 18 s.d. 19 Agustus 2020



Pemutakhiran TL Dalam Rangka LHP BPK Tahun 2010 - 2018 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan di Hotel Neo+ Sentul, Bogor pada tanggal 17 s.d. 18 September 2020;



Reviu APIP dalam Pelaksanaan Likuidasi Aset Bapertarum-PNS di Novotel, Tangerang pada tanggal 5 Oktober 2020





Rapat Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 di Aviary, Bintaro pada tanggal 8 Oktober 2020



Penyelesaian LHP BPKP Pada Satker BLU PPDPP di RR 1 DJPI pada tanggal 12 Oktober 2020 di Jakarta



Koordinasi Tim Satgas SPIP TA.2020 di Amartahills, Malang pada tanggal 18 s.d. 20 November 2020

## 6) Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN

- a. Penatausahaan dan Pengelolaan Bmn Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Tahapan Penyusunan RKBMN dan Konsolidasi data Aplikasi SIMAN, di Hotel The 101 Jalan Darmawangsa IX No. 14, Kebayoran Baru, pada Tanggal 3 September 2020



Tahapan Penyusunan RKBMN dan Konsolidasi data Aplikasi SIMAN, di Ruang Rapat 1 Gedung A1 Lantai 2 Wing 3 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Tanggal 24 Agustus 2020



Penertiban Kendaraan Dinas, di RR 1 Lantai 2 wings 3 DJPI pada Tanggal 16 nov 2020





**SETDITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**